



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN POLITIK BAHASA DI FEDERASI RUSIA
SEBAGAI STRATEGI INTEGRASI NASIONAL**

SKRIPSI

**YULIA KRISTININGRUM
0806468354**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI RUSIA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN POLITIK BAHASA DI FEDERASI RUSIA
SEBAGAI STRATEGI INTEGRASI NASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
humaniora**

**YULIA KRISTININGRUM
0806468354**

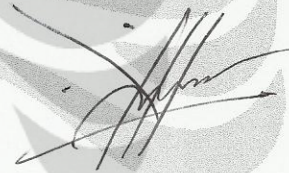
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI RUSIA
DEPOK
JULI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika dikemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.


Depok, 13 Juli 2012



Yulia Kristiningrum

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yulia Kristiningrum
NPM : 0806468354
Tanda Tangan : 
Tanggal : 13 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Yulia Kristiningrum
NPM : 0806468354
Program Studi : Rusia
Judul : Penerapan Politik Bahasa di Federasi Rusia Sebagai Strategi Integrasi Nasional

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ahmad Fahrurodji, M.A.

Pembaca : Dr. Zeffry Alkatiri

Ketua Sidang : Mina Elfira, Ph.D.

Ditetapkan di : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok
Tanggal : 13 Juli 2012

oleh
Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih /kepada:

- 1) Bapak Ahmad Fahrurodji M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- 2) Bapak Dr. Zeffry Alkatiri selaku pembimbing akademik sekaligus pembaca yang tidak hanya telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulisan skripsi Penulis tapi juga karena selama empat tahun ini selalu meluangkan waktunya bagi Penulis untuk membantu dalam menyusun rencana perkuliahan.
- 3) Segenap dosen Program Studi Sastra Rusia: Ibu Mina Elfira, Ph.D. selaku ketua sidang pada saat Penulis mempertanggungjawabkan skripsi ini, Ibu Prof. Dr. N. Jenny MT Hardjatno, Ibu Dr. Thera Widyastuti, Ibu Sari Endahwarni M.A., Bapak Mohammad Nasir Latief M.Hum., Bapak Ahmad Sujai M.A., Bapak Banggas Limbong M.Hum., Ibu Nia Kurnia Sofiah M. App. Ling., Bapak Fadli Zon M.Sc., Ibu Sari Gumilang M. Hum, Bapak Reynaldo de Archellie S. Hum, Bapak Hendra Kaprisma S. Hum, dan Bapak Abuzar Rouskhanfikri S. Hum yang telah membagi ilmunya kepada Penulis;
- 4) Kedua orang tua Penulis, ibunda Suherni dan ayahanda Sukrisno karena hanya dengan doa dan dukungan merekalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada adik penulis, Dewi, yang selalu memberi semangat kepada Penulis;

- 5) Teman-teman Prodi Rusia angkatan 2008: Awal, Soraya, Faiqoh, Riani, Fahna, Lala, Fahsha, Raras, Karin, Icha, Pisces, Ismail, Adon, Ridho, Sarom, Abi, Adit, Dimas, Aji, Resa, Riga, Jhon, Acen, Andin, Arif, Arman, Bangber, Danti, Febi, Ferdi, Gie, Ian, Inas, Iyus, Kiki, Muti, Hari, Olga, Pelangi, Natama, Yuyun, yang memberikan kenangan tak terlupakan dalam kehidupan Penulis setidaknya selama empat tahun ini;
- 6) Teman-teman A/3 Mawar Residence: Widya, Mamas, Mumut, Ami, Aga, Nanda, Citra, Seli, Galuh, Gadis yang selalu menemani dengan canda dan tawa saat penulis mengerjakan skripsi ini;
- 7) Dan masih banyak pihak yang tidak kurang baiknya terhadap penulis yang belum disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 13 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Kristiningrum
NPM : 0806468354
Program Studi: Rusia
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENERAPAN POLITIK BAHASA DI RUSIA SEBAGAI STRATEGI
INTEGRASI NASIONAL**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juli 2012
Yang menyatakan


(Yulia Kristiningrum)

ABSTRAK

Nama : Yulia Kristiningrum
Proram Studi : Rusia
Judul : Penerapan Politik Bahasa Di Federasi Rusia Sebagai Strategi Integrasi Nasional

Skripsi ini membahas politik bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Federasi Rusia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Bukti-bukti yang terdapat di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pada saat ini, pemerintah Federasi Rusia melakukan pendekatan yang lain dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Kekaisaran dan Uni Soviet, dalam hal politik bahasa. Jika sebelumnya, bahasa-bahasa etnis minoritas dibatasi perkembangannya, saat ini pemerintah Federasi Rusia memberikan kelonggaran bagi etnis-etnis minoritas untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya. Hal ini kemudian meruncing pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah Federasi Rusia menggunakan politik bahasa sebagai strategi integrasi nasional model *unity in diversity*.

Kata kunci: politik bahasa, etnis, integrasi nasional, Federasi Rusia

ABSTRACT

Name : Yulia Kristiningrum
Major : Russian
Title : The Role of Language Politics in Russian Federation as the Strategy of National Integration

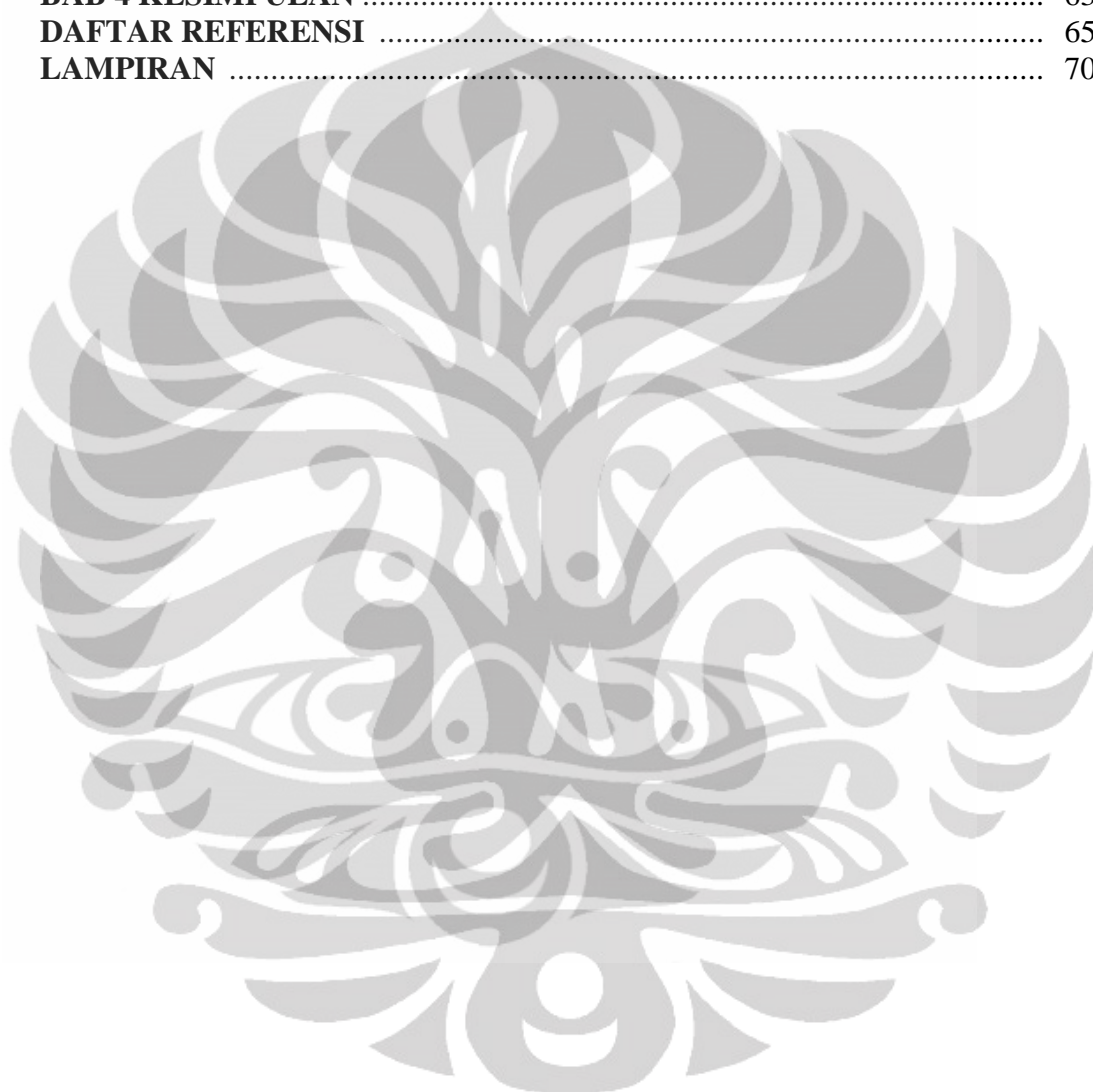
This thesis explains about language politics which is applied by the government of the Russian Federation. This thesis uses descriptive-analytical method. The evidence in this thesis shows that currently, the government of the Russian Federation makes different approach on language politics from previous governances. If at the previous regime, the Tsarist and Union Soviet government, ethnic languages' development was restricted, now the government of the Russian Federation guarantees the preservation and development of ethnic minorities' languages. It is then concluded that the government of the Russian Federation uses language politics as national integration strategy of *unity in diversity*.

Keywords: language politics, ethnic, national integration, Russian Federation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Landasan Teori	4
1.5.1 Integrasi Nasional.....	4
1.5.2 Politik Bahasa	6
1.5.3 Politik Identitas Etnis	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Sumber Data	9
1.8 Tinjauan Pustaka	10
1.9 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 ETNIS DAN SEJARAH POLITIK BAHASA DI RUSIA	13
2.1 Kelompok-Kelompok Etnis di Rusia	13
2.1.1 Rumpun Slavia	16
2.1.2 Rumpun Iran	18
2.1.3 Rumpun Altai	19
2.1.4 Rumpun Kaukasus	21
2.1.5 Rumpun Ural	22
2.2 Sejarah Politik Bahasa di Rusia	24
2.2.1 Politik Bahasa Pada Masa Kekaisaran	24
2.2.2 Politik Bahasa Pada Masa Uni Soviet	28
2.2.3 Kebangkitan Bahasa-Bahasa Minoritas di Uni Soviet	34
BAB 3 ANALISIS POLITIK BAHASA SEBAGAI STRATEGI INTEGRASI NASIONAL DI FEDERASI RUSIA	37
3.1 Multilingualisme di Federasi Rusia	37
3.2 Politik Bahasa di Beberapa Republik di Federasi Rusia	40
3.2.1 Politik Bahasa di Republik Yakutia (Sakha)	41
3.2.2 Politik Bahasa di Republik Karelia	44

3.2.3 Politik Bahasa di Republik Buryatia	47
3.2.4 Politik Bahasa di Republik Tatarstan.....	49
3.4.5 Politik Bahasa di Republik Chuvashia	51
3.4.6 Politik Bahasa di Republik Dagestan	53
3.4.7 Politik Bahasa di Republik Khakasia	56
3.4.8 Politik Bahasa di Republik Tyva	58
3.3 Politik Bahasa di Federasi Rusia Sebagai Strategi Integrasi Nasional .	59
BAB 4 KESIMPULAN	63
DAFTAR REFERENSI	65
LAMPIRAN	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Peta Persebaran Rumpun Bahasa Slavia.....	17
Gambar 2.3	Peta Persebaran Rumpun Bahasa Iran di Dunia.....	19
Gambar 2.4	Peta Persebaran Rumpun Bahasa Altai di Dunia	21
Gambar 2.5	Peta Persebaran Kelompok-Kelompok Etnolinguistik di Wilayah Kaukasus.....	22
Gambar 2.6	Peta Persebaran Rumpun Bahasa Ural di Dunia	23
Gambar 3.1	Fragmen angket sensus penduduk pada tahun 2002 (blok pertanyaan-pertanyaan tentang penguasaan bahasa).....	40
Gambar 3.2	Penampilan Buranovskie Babushki Pada Kontes Menyanyi Eurovision tahun 2012.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel Daftar Kelompok-Kelompok Etnis di Rusia Berdasarkan Bahasa.....	13
-----------------------------------------------------------------------	----

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rusia adalah sebuah negara besar. “Kebesaran” Rusia ini tidak hanya dilihat dari politik atau pengaruhnya terhadap dunia internasional tapi dilihat dari wilayahnya pun Rusia merupakan negara yang besar. Federasi Rusia adalah negara terluas di dunia dengan total wilayah mencapai 17.098.240 km² (UN Data: 2008). Ini hampir dua kali luas benua Australia dan tiga kali luas Indonesia. Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Federal Statistik Negara (*Федеральная служба государственной статистики* (Federal'naja služba gosudarstvennoj statistiki)) pada tahun 2010 mencatat bahwa di seluruh wilayah Rusia hidup sekitar 143 juta penduduk dengan lebih dari 195¹ kelompok etnis.

Banyaknya kelompok etnis yang hidup di wilayah Rusia di satu sisi dapat dianggap sebagai kekayaan budaya tetapi di lain sisi dapat menjadi potensi bagi terjadinya disintegrasi nasional. Masalah etnis dan integrasi nasional di suatu negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Telah banyak catatan sejarah yang memperlihatkan contoh disintegrasi nasional akibat masalah atau ketegangan etnis, seperti pecahnya Yugoslavia.

Seperti negara multietnis lainnya, Rusia juga tidak terlepas dari konflik etnis. Wilayah kekuasaan Rusia yang sangat luas sekarang adalah berkat penaklukan-penaklukan yang dilakukan dari zaman Kekaisaran. Sejak pemerintahan Tsar Ivan IV “The Terrible” (1533-1584), Kekaisaran Rusia telah menaklukan daerah-daerah yang mayoritas penduduknya bukan etnis Rus, seperti Kazan (1552) dan Astrakhan (1556). Untuk memperkuat kekuasaan di daerah-daerah taklukan, Kekaisaran Rusia tidak jarang mendeportasi warga asli daerah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Tsar Ivan IV ketika ia mendeportasi warga muslim dari Kazan dan membawa etnis Rus untuk menempati kota tersebut (Hosking, 2001: 117-119). Pada masa Peter Agung (1682-1725), Rusia berhasil

¹ Dalam sensus ini dimasukkan semua bangsa (*nationality*) dan kelompok etnis yang tinggal di wilayah Rusia, termasuk kelompok etnis yang bukan asli Rusia, seperti etnis Kurdi, etnis Cina, dan penduduk berkewarganegaraan selain Rusia, seperti Pakistan, India, dan Amerika.

menaklukkan hampir seluruh pesisir timur Teluk Riga, pesisir selatan, utara dan timur Teluk Finlandia, bahkan sampai menguasai Swedia (Walsh, 1958: 113). Perluasan terus dilakukan oleh tsar-tsar berikutnya hingga wilayah Kekaisaran Rusia membentang dari Samudra Artik (utara) sampai Laut Hitam (selatan) dan dari Laut Baltik (barat) hingga Samudra Pasifik (timur).

Pemerintahan Kekaisaran Rusia bukanlah pemerintahan yang sepi dari pemberontakan. Tercatat beberapa pemberontakan berbasis etnis pernah terjadi, seperti pemberontakan etnis Bashkir (1705-1709), Belarusia (1839), Polandia (1863) (Vernadsky, 1959: 154; Bremmer dan Tarras, 1993: 161). Untuk meredam hal itu dibuatlah beberapa kebijakan, antara lain kebijakan bahasa dan budaya yang oleh para sarjana disebut *rusifikasi*. Contoh dari kebijakan *rusifikasi* ini pengadopsian abjad Sirilik (*Кириллица* (Kirillica)) menjadi sistem abjad bahasa Lithuania (Weeks, 2004: 472). Proses penyatuan wilayah Rusia bukanlah hal yang didasari oleh kesamaan sejarah, bahasa, maupun budaya tetapi didasari oleh penaklukan. O. V Klyuchevsky mengatakan bahwa sejarah Rusia adalah sejarah tentang sebuah bangsa yang menjajah dirinya sendiri (Brown, Kaser, dan Smith (ed.), 1994: 29).

Pada zaman Uni Soviet, permasalahan mengenai etnis ini menjadi lebih kompleks seiring dengan luasnya wilayah dan banyaknya rakyat dari berbagai latar belakang budaya yang tergabung dalam kerangka negara Uni Soviet. Para pemimpin Uni Soviet mencita-citakan sebuah masyarakat tanpa kelas, masyarakat tanpa perbedaan. Akan tetapi, sulit untuk mewujudkan hal ini di sebuah wilayah yang memiliki ratusan etnis. Para pemimpin Uni Soviet menyadari bahwa masalah etnisitas pada suatu saat akan menjadi masalah besar bagi keutuhan negara mereka. Oleh karena itu, pemerintah Uni Soviet mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan identitas dari etnis-etnis yang berbeda dan membuatnya menjadi satu masyarakat yang sama. Kebijakan ini disebut *korenizatsiya*, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *nativization*² (Dietrich, 2005: 1).

Di antara kebijakan *korenizatsiya* terdapat politik bahasa yang diimplementasikan dengan pembentukan '*Народный комиссариат по делам*

² Di dalam bahasa Indonesia istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai *pengakaran*, sesuai dengan kata dasarnya '*корень*' (koren') yang berarti akar atau asal mula (Russko-indonezijskij slovar'. Moskva: izdatel'stvo <<Sovetskaja Enciklopedija>>. 1972.)

национальностей' (Narodnyj komissariat po delam nacional'nostej) (Kommisariat Rakyat untuk Urusan Bangsa-Bangsa) yang disingkat dengan *NKN* atau *Narkomnats*. *Narkomnats* adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat Uni Soviet yang berwenang dalam politik bahasa, seperti standarisasi bahasa-bahasa lokal, penyebaran bahasa Rusia sebagai bahasa resmi, merubah leksikon bahasa untuk disesuaikan dengan masyarakat industri modern, menurunkan angka penyandang buta aksara, dan membuat abjad baru. Salah satu contoh dari politik bahasa yang dilakukan pemerintah Uni Soviet adalah pengadopsian abjad Sirilik untuk bahasa-bahasa etnis minoritas non-Slavia (Dietrich, 2005: 1).

Politik bahasa yang dilakukan pada zaman Kekaisaran sampai zaman Uni Soviet menunjukkan begitu pentingnya bahasa bagi kelangsungan integrasi nasional. Stephen Greymorning, seorang profesor *Native Studies* di *University of Montana*, menulis:

“More than anything else it is due to this reality, the role languages play in shaping people's identity,... Prior to the birth of United Nation language did more than symbolize who a people were. It also played a significant role in defining nations.”

“Lebih dari apapun juga, dilihat dari kenyataannya, bahasa berperan dalam pembentukan identitas seseorang,... Sejak kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa bahasa tidak hanya menyimbolkan siapakah manusia tersebut. Bahasa juga berperan secara signifikan dalam mendefinisikan bangsa-bangsa.” (2000: 190) “

Bahasa tidak hanya diperlukan untuk berkomunikasi tapi bahasa juga berperan penting dalam mengidentifikasi diri. Melalui bahasa, manusia dapat mengidentifikasikan dirinya sebagai “kami” yang berbeda dengan “mereka”. *Di antara semua ciri budaya, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain* (Harimurti dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder (ed.), 2005: 5-6).

Pasca runtuhnya Uni Soviet, kebijakan bahasa tetap dilakukan oleh pemerintah Federasi Rusia. Tentunya kebijakan bahasa di Rusia pada zaman Federasi berbeda dengan kebijakan bahasa pada zaman Uni Soviet maupun zaman Kekaisaran. Kebijakan bahasa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Federasi Rusia saat ini lebih sebagai reaksi atas terancam punahnya bahasa-bahasa minoritas.

Perbedaan politik bahasa yang diterapkan pada masa Kekaisaran dan Uni Soviet dengan politik bahasa yang diterapkan pada masa setelah runtuhnya Uni Soviet memunculkan sebuah pertanyaan apakah perubahan penerapan politik bahasa ini berkaitan dengan strategi integrasi nasional di Rusia. Untuk menganalisa hal tersebut di dalam skripsi ini akan digunakan teori integrasi nasional, teori politik bahasa, dan teori politik identitas etnis.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diajukan di dalam skripsi ini adalah bagaimana kaitan antara politik bahasa dengan integrasi nasional di Federasi Rusia.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan politik bahasa di Federasi Rusia yang dihubungkan dengan proses integrasi nasional.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan pembatasan masalah. Penulis hanya akan membahas dan menganalisa pelaksanaan politik bahasa di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet.

1.5 Landasan Teori

Di dalam menganalisa permasalahan yang diajukan di atas, penulis menggunakan tiga teori, yaitu teori integrasi nasional, teori politik bahasa, dan teori politik identitas etnis.

1.5.1 Integrasi Nasional

Bagi Myron Weiner (1965: 54), seorang profesor Ilmu Politik dan anggota Pusat Kajian Internasional di *Massachusetts Institute of Technology*, “integrasi” merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai macam fenomena politik. Integrasi dapat digunakan untuk menjelaskan proses penyatuan kelompok-kelompok yang secara sosial dan kultural berbeda menjadi satu

identitas nasional dan bergabung dalam satu unit teritori. Integrasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara orang yang diperintah dan yang memerintah, begitu juga dengan penyatuan sikap atau pendapat warga negara dalam sebuah proses politik, dan dapat juga menjelaskan proses penyatuan individu-individu dalam sebuah organisasi yang memiliki kegiatan dan tujuan-tujuan tertentu. Dari semua hal tersebut, Myron Weiner berkesimpulan bahwa integrasi *holds a society and a political system together* (menyatukan sebuah masyarakat dan sistem politik).

Secara konseptual, integrasi nasional mengandung implikasi penyatuan perbedaan elemen-elemen sosial, ekonomi, politik, agama, etnis dan geografis dalam satu negara (*nation-state*) (Fisher, 1971: 12). Menurut Coleman dan Rosberg terdapat dua dimensi dalam proses integrasi nasional di suatu negara, yaitu vertikal dan horizontal (1964: 8-9). Dimensi vertikal diperuntukan bagi proses integrasi antara kaum elit politik dengan rakyat. Dimensi vertikal ini kemudian disebut dengan integrasi politik. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi horizontal adalah proses integrasi yang ada di daerah-daerah yang bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan budaya kedaerahan. Dimensi vertikal ini kemudian disebut dengan integrasi teritorial.

Myron Weiner mengajukan dua strategi yang mungkin ditempuh oleh suatu bangsa untuk mewujudkan integrasi nasional. Strategi pertama ia sebut sebagai strategi asimilasi. Strategi asimilasi ini bertujuan untuk menjadikan kebudayaan etnis mayoritas sebagai budaya nasional. Dengan demikian, kebudayaan etnis mayoritas akan mendominasi kebudayaan etnis minoritas. Strategi kedua adalah strategi persatuan dalam keanekaragaman (*unity in diversity*). Strategi kedua ini berusaha mewujudkan integrasi nasional dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas sehingga identitas etnis minoritas tetap diakui sama seperti identitas etnis mayoritas (1965: 56).

Yurij Bojko, seorang doktor Ilmu Politik di Akademi Diplomat Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, menegaskan bahwa integrasi nasional adalah sebuah proses yang sangat rumit, yang tidak hanya melibatkan aspek sosial-ekonomi, namun juga sejarah, budaya, adat istiadat, serta keyakinan

beragama (2008: 23). Belajar dari sejarah runtuhnya Uni Soviet yang disebabkan oleh semangat nasionalisme di daerah-daerah, integrasi nasional kini menjadi wacana sebagai sebuah strategi untuk menjaga keutuhan negara Federasi Rusia. Menurut Yuriy Bojko masalah etnisitas, termasuk di dalamnya persamaan peran dan hak etnis-etnis di Rusia, merupakan masalah inti bagi politik nasional dan menjadi strategi pengukuhan hubungan antar subjek federasi (2008: 14).

Di dalam artikelnya yang berjudul '*Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в России?*' (Vosmožna li mul'tikul'turnaja model' integracii migrantov v Rossii?) (Dapatkah model integrasi multikultural migran-migran terjadi di Rusia?), V. O. Ščerdina kurang lebih setuju dengan Myron Weiner. Dia menulis bahwa ada dua pendekatan yang bisa digunakan untuk mewujudkan integrasi di suatu negara multietnis seperti Federasi Rusia. Pendekatan pertama adalah dengan model asimilasi. Ia mencontohkan model ini seperti keadaan di Amerika Serikat dimana negara tersebut menjadi *melting pot* (tempat percampuran) bagi berbagai macam orang yang tinggal di dalamnya. Pendekatan kedua adalah model multikultural atau dapat kita samakan seperti model *unity in diversity* Myron Weiner.

Di dalam sebuah negara yang masyarakatnya heterogen, faktor etnisitas sangat berperan dalam tercapainya integrasi nasional, di samping faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi dan politik. Walaupun pada zaman globalisasi seperti sekarang batas-batas waktu, tempat, dan budaya semakin menipis tapi semangat etnisitas atau kesukuan tidak akan luntur begitu saja, apalagi pada masyarakat yang identitas etnisnya sangat kuat. Hal ini ditekankan oleh R. William Liddle, etnisitas mungkin saja telah bercampur dengan dikurangi oleh ikatan primordial lain akan tetapi rasa kesukuan itu sendiri belum tentu sirna (Bahar dan Tangdililing, 1996: 20).

1.5.2 Politik Bahasa

S. N. Kuznesov di dalam artikelnya yang berjudul '*Язык и политика*' (Jazyk i poliyika) (Bahasa dan politik) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dalam hubungan politik dan bahasa. Pertama, bahasa sebagai alat politik dan kedua, bahasa sebagai objek politik. Aspek yang pertama menjelaskan mengenai

penggunaan bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat guna mendapatkan tujuan politik tertentu. Aspek pertama ini disebut dengan “bahasa politik”. Sering kali permainan politik ditunjukkan dengan permainan kata-kata atau permainan bahasa. Hal ini menjelaskan mengapa seorang tokoh politik juga harus merangkap sebagai orator yang baik. Kalau pun tokoh politik tersebut bukanlah orator yang baik maka ia akan membutuhkan seorang ahli linguistik yang mumpuni untuk dapat menarik hati masyarakat melalui kata-kata atau bahasa yang ia ciptakan (Anwar, 1990: 60-61). Aspek kedua hubungan antara bahasa dan politik menjelaskan tentang bagaimana politik mempengaruhi perkembangan sebuah bahasa. Aspek kedua inilah yang disebut sebagai “politik bahasa”. Politik bahasa sering disandingkan dengan istilah “perencanaan bahasa” (*language planning*) (Kuznesov, 2008: 2)

Setidaknya ada tiga objek dalam politik bahasa. Objek politik bahasa yang pertama adalah bahasa atau sekelompok bahasa yang digunakan di masyarakat. Objek kedua adalah situasi bahasa. Situasi bahasa di sini diartikan sebagai interaksi dan hubungan antar bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Objek ketiga adalah situasi komunikasi, yaitu pembentukan perilaku-perilaku dalam percakapan, identitas bahasa, dan tingkatan-tingkatan bahasa yang digunakan di sebuah kelompok masyarakat ketika berkomunikasi, misalnya penggunaan kata-kata tabu, dialek-dialek atau jargon-jargon tertentu (Kuznesov, 2008: 4).

Ada beberapa tujuan diselenggarakannya politik bahasa di suatu negara. Untuk sebuah bahasa yang telah terbentuk sejak lama, seperti bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, politik bahasa berperan dalam melestarikan, menjaga, dan juga mengubah bahasa tersebut. Tujuan lain dari politik bahasa adalah untuk menciptakan bahasa tulis baru (contohnya bahasa Indonesia), memperbarui fungsi dari bahasa-bahasa yang hampir punah (contohnya bahasa Ibrani), menciptakan sistem bagi penggunaan bahasa daerah, dan menciptakan sebuah bahasa internasional (Kuznesov., 5).

Tidak ada negara di dunia ini yang tidak peduli dengan bahasa apa yang menjadi bahasa resmi di wilayahnya (Anwar, 1990: 63). Oleh karena itu, politik bahasa adalah hal yang penting dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerusakan bahasa yang terjadi di India dan politik bahasa yang dilakukan oleh

rezim Komunis Peking di Cina (Ornstein, 1: 1959) memperlihatkan bahwa bahasa juga dapat menjadi sumber konflik di sebuah negara.

1.5.3 Politik Identitas Etnis

Di dalam bukunya, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Ubed Abdilah S. menulis bahwa terdapat tiga hal yang menjadi permainan politik identitas, yaitu jender dan alam, rasisme, serta agama dan bahasa. Etnisitas menjadi aspek yang penting dalam politik karena pada dasarnya istilah ‘etnisitas’ menyangkut gagasan tentang perbedaan dikotomi *kami* dan *mereka* dan perbedaan terhadap dasar, asal usul, serta karakteristik budaya. Dalam hubungannya dengan budaya, kelompok etnis selalu ingin tampil dalam corak kebudayaannya dan selalu mempertahankannya untuk eksis (Abdilah S., 2002: 15-16). Identitas etnis yang berasal dari dasar, asal usul, dan karakteristik budaya itu kemudian dijadikan sebagai permainan politik.

Etnis atau etnik berasal dari kata *ethnic* (bahasa Inggris) yang diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang berarti *nation* (bangsa). Kata *bangsa* di sini tidak merujuk pada kesatuan politik tetapi merujuk pada kesatuan manusia yang memiliki ikatan darah atau keturunan. Terdapat beberapa perbedaan diantara para ahli untuk mendefinisikan kata *etnis* pada zaman modern ini. Ada yang menekankan definisi etnis pada asal muasal, kesamaan budaya, maupun sejarah kelompok etnis yang bersangkutan. Menurut Joe R. Feagin dan Clairece Booth Feagin di dalam buku *Racial and Ethnic Relation: Making Identities in A Changing World*, etnis adalah suatu kelompok yang dibedakan, oleh kelompok lain maupun kelompok itu sendiri, terutama atas dasar karakteristik budaya maupun asal bangsa (*national-origin*) (Cornell dan Hartmann, 2007: 16-17).

Beberapa ahli sosiologik menyatakan bahwa bahasa adalah komponen paling dasar dari sebuah identitas etnis; sebuah kriteria untuk mendefinisikan etnisitas itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Gloria Anzaldua, bahwa seringkali identitas etnis muncul bersamaan dengan identitas bahasa – *I am my language* (aku adalah bahasaku) (Hall dan Bucholtz (ed.), 1995: 356-357). Bahasa merupakan “perwujudan dari inti keberadaan masyarakat, yaitu kekuatan dari dalam, yang tanpanya keberadaannya akan terhapus” (Abdilah S., 2002: 70). Jika

kita berbicara dalam konteks Rusia maka penggunaan bahasa sebagai sebuah alat politik sangatlah jelas. Seperti yang dikatakan oleh Haarmann, peran bahasa dalam menunjukkan identitas sebuah etnis semakin meningkat sejak abad XX (Fowkes, 2002: 7).

1.6 Metode Penelitian

Di dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan keadaan dari data-data yang dikumpulkan untuk selanjutnya seobyektif mungkin dilakukan interpretasi dengan melakukan perbandingan dan perlengkapan dari berbagai sumber yang didapat. Di dalam metode ini juga diperlukan pengumpulan data-data mengenai informasi yang dicari yang berasal dari tulisan maupun artikel atau karya ilmiah (Suriasumantri, 2001: 68). Kemudian, untuk mendukung metode deskriptif-analisis, diperlukan juga metode studi pustaka yang bertujuan mendapatkan data-data yang dibutuhkan melalui buku dan literatur lainnya. Menurut Mestika Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (2004:3).

1.7 Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Sumber data pertama adalah sumber primer, yaitu:

1. *‘Конституция российской федерации’* (Konstitucija rossijskoj federacii) (Konstitusi Federasi Rusia) yang disahkan pada tahun 1993. Diunduh dari www.constitution.ru.
2. *‘Европейская хатя региональных языков или языков меньшинств’* (Evropejskaja xatja regional’nyh jazykov ili jazykov men’shinstv) (Piagam Eropa Untuk Bahasa-Bahasa Regional atau Bahasa-Bahasa Minoritas) yang diratifikasi oleh pemerintah Federasi Rusia pada 10 Mei 2001. Diunduh dari <http://www.coe.int/>.

3. ‘*О языках народов российской федерации*’ (O jazykax narodov rossijskoj federacii) (Undang-Undang Tentang Bahasa-Bahasa Rakyat Federasi Rusia) yang disahkan pada tahun 1991
Diunduh dari <http://base.consultant.ru>

Sumber data kedua adalah sumber sekunder yang berasal dari buku teks, jurnal ilmiah, dan beberapa sumber lainnya yang diperoleh dari internet.

1.8 Tinjauan Pustaka

Sebagai pertanggungjawaban penulis untuk menghasilkan karya yang orisinal, penulis telah mencoba untuk mencari penelitian terdahulu mengenai kebijakan bahasa di Federasi Rusia milik civitas akademika Universitas Indonesia. Terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas tentang etnis di Rusia, yaitu penelitian terdahulu karya Fadli Zon (1997) yang berjudul *Faktor Etnonasionalisme dalam Disintegrasi Uni Soviet* dan penelitian terdahulu karya Donny Hermaswangi (2008) yang berjudul *Kebijakan Vladimir Putin Terhadap Gerakan Etnonasionalisme Chechnya di Rusia (2000-2005)*. Di dalam karyanya, Fadli Zon mengkaji tentang permasalahan etnonasionalisme di Uni Soviet yang berakhir pada terjadinya disintegrasi negara tersebut, sedangkan Donny Hermaswangi mengkaji tentang kebijakan yang dilakukan oleh Vladimir Putin dalam menghadapi ancaman disintegrasi dari etnis Chechen dalam kurun waktu 2000-2005. Akan tetapi, di dalam dua penelitian terdahulu tersebut tidak ditemukan pembahasan mengenai politik bahasa.

Walaupun tidak ditemukan penelitian terdahulu milik civitas akademika Universitas Indonesia, rupanya penelitian mengenai politik bahasa di Federasi Rusia merupakan sebuah topik yang banyak dikaji oleh para akademisi, baik dari dalam Rusia maupun luar Rusia. Di dalam jurnal *Language Policy in the Russian Federation: Language Diversity and National Identity*, Marc Leprêtre (2002) mengkaji hubungan antara bahasa dan nasionalisme. Ia juga berasumsi bahwa politik bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar etnis dan menjamin adanya keragaman bahasa di Federasi Rusia. Kajian mengenai politik bahasa dari akademisi Rusia dapat ditemui, misalnya

seperti *Language Policy in Russia: the Case Study of the Yakut Language* karya Darima Badmatsyrenova dan *Language Policy and Minority Language Planning in Russia: the Case Study of the Kalmyk Language* karya Bossia Kornousova (2001). Di dalam jurnal tersebut Badmatsyrenova dan Kornousova mengkaji implementasi politik bahasa di daerah-daerah di Federasi Rusia dan menyimpulkan bahwa kondisi dan pemakaian bahasa-bahasa minoritas, seperti bahasa Yakut dan bahasa Kalmyk, masih buruk. Pemerintah Federasi Rusia diharapkan mampu membuat sebuah kebijakan yang benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik agar bahasa-bahasa etnis minoritas ini tidak punah.

Jika Badmatsyrenova dan Kornousova membahas politik bahasa secara mendetail pada satu wilayah, di dalam skripsi ini penulis mengkaji pelaksanaan dan penerapan politik bahasa di Rusia secara lebih umum. Marc Leprêtre di dalam karyanya tidak menggunakan satu teori pun, sedangkan di dalam skripsi ini penulis tiga teori yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu teori politik bahasa, teori politik identitas, dan teori integrasi nasional untuk menganalisa penerapan politik bahasa di Rusia. Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan sudut pandang lain mengenai politik bahasa di Rusia.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari buku-buku referensi yang digunakan untuk memperdalam teori. Penulis pertama kali mendapat informasi mengenai integrasi nasional ketika membaca buku *Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi* (1996). Buku ini merupakan sebuah rangkuman dari makalah-makalah yang disampaikan pada saat Seminar Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Di dalam buku ini tidak hanya dibahas integrasi nasional sebagai suatu teori, tapi juga implementasinya di Indonesia dan negara-negara lain, seperti Malaysia, Kamboja, dan Sri Lanka. Setelah membaca buku tersebut, penulis merasa bahwa integrasi nasional juga dapat menjadi kajian untuk Federasi Rusia, sebuah negara multi etnis seperti Indonesia. Pemahaman mengenai konsep “politik bahasa” didapatkan dari jurnal-jurnal seperti *Язык и политика (Jazyk i politika)* (Bahasa dan Politik) karya V. P. Grigoref (2008). Di dalam jurnal tersebut dijelaskan secara jelas,

singkat, dan padat pengertian dari politik bahasa, dan hal-hal lain, seperti objek, tujuan, subjek, dan status yang digunakan dalam politik bahasa itu sendiri.

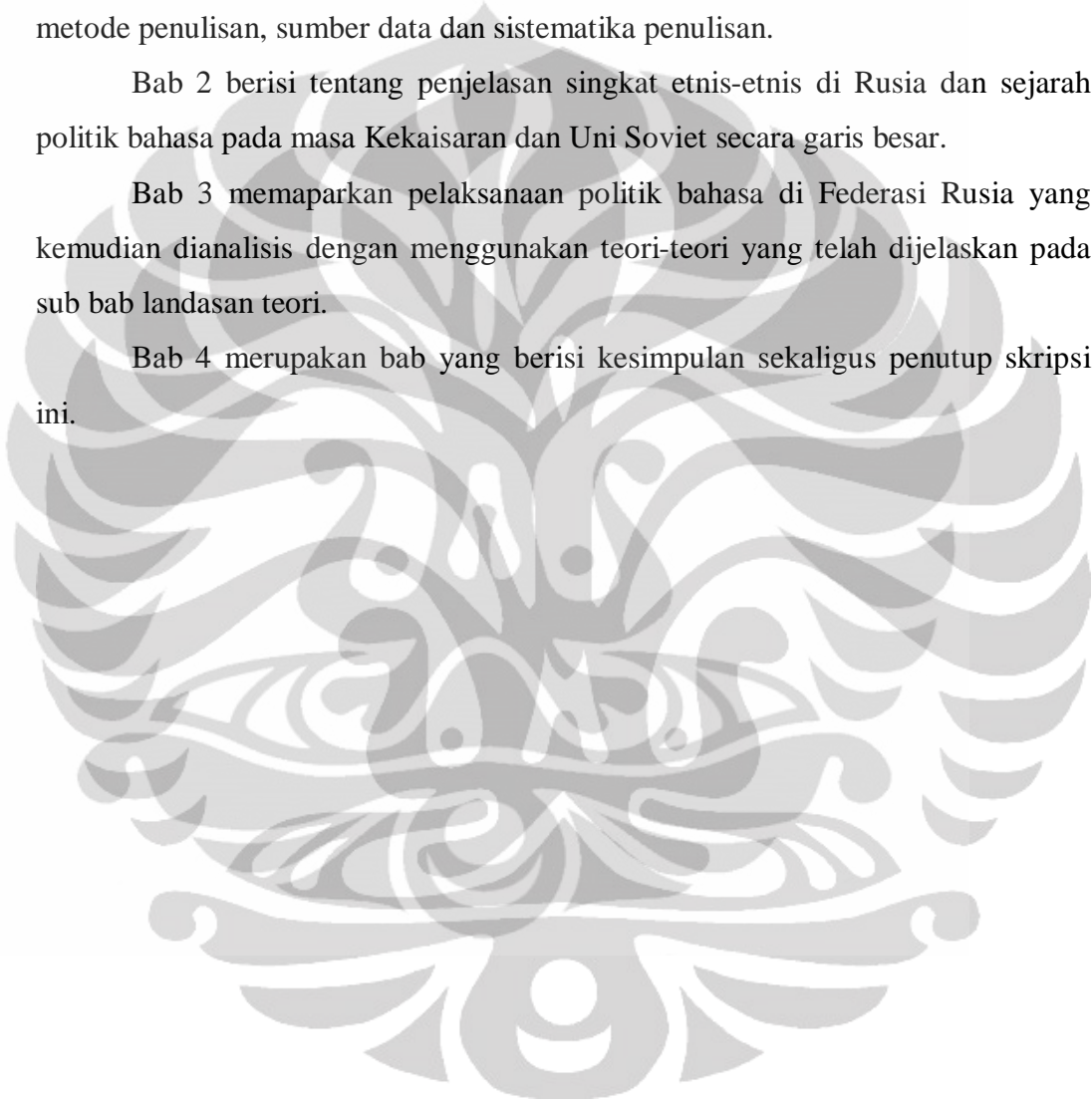
1.9 Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, batasan masalah, landasan teori, metode penulisan, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang penjelasan singkat etnis-etnis di Rusia dan sejarah politik bahasa pada masa Kekaisaran dan Uni Soviet secara garis besar.

Bab 3 memaparkan pelaksanaan politik bahasa di Federasi Rusia yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan pada sub bab landasan teori.

Bab 4 merupakan bab yang berisi kesimpulan sekaligus penutup skripsi ini.



BAB 2 ETNIS DAN SEJARAH POLITIK BAHASA DI RUSIA

Sebagai sebuah negara multi etnis, Rusia memerlukan sebuah alat untuk mempersatukan berbagai perbedaan budaya agar keutuhan wilayahnya tetap terjaga. Oleh karena itu, di dalam bab ini akan dijabarkan mengenai keanekaragaman dan persebaran kelompok-kelompok etnis di Rusia serta sejarah mengenai politik bahasa di Rusia. Hal ini diperlukan agar diperoleh gambaran mengapa dan sejak kapan bahasa menjadi objek dari kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh otoritas Rusia sebagai alat untuk menjaga keutuhan wilayahnya.

2.1 Kelompok-Kelompok Etnis di Rusia

Letak negara Rusia yang berada di antara benua Eropa dan benua Asia tentunya memberikan dampak tersendiri terhadap kehidupan warganya. Pertemuan antara berbagai kebudayaan terjadi di daerah ini. Tak mengherankan jika di wilayah Rusia terdapat ratusan etnis yang memiliki akar kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kompleksnya kehidupan etnis di negara Federasi Rusia. Ciri khas yang digunakan untuk membedakan antara etnis satu dan etnis lainnya lebih banyak terletak pada bahasa yang mereka gunakan daripada ciri budaya lainnya atau karakter fisik.

Tabel Daftar Kelompok-Kelompok Etnis di Rusia Berdasarkan Bahasa

No.	Rumpun Bahasa	Subdivisi	Nama Etnis	Jumlah	Persentase terhadap Keseluruhan Populasi di Rusia
1.	Indo-Eropa	Balto-Slavia	Rus	111.016.896	80,90%
			Ukraina	1.930.000	1,41%
			Belarusia	521.443	0,38%
			Polandia	47.125	0,04%
			Lithuania	31.377	0,03%
			Bulgaria	24.038	0,02%
			Latvia	18.979	0,01%

No.	Rumpun Bahasa	Subdivisi	Nama Etnis	Jumlah	Persentase terhadap Keseluruhan Populasi di Rusia	
	Indo-Eropa	Indo-Iran	Osseatia	528.515	0,39%	
			Armenia	1.180.000	0,86%	
			Tajik	200.303	0,15%	
		Jerman	Jerman	394.138	0,29%	
			Hellenik	Yunani	85.640	0,06%
				Roma	204.958	0,15%
Moldova	156.400	0,12%				
2.	Altai	Turki	Tatar	5.310.648	3,9%	
			Bashkir	1.584.554	1,16%	
			Chuvash	1.435.872	1,05%	
			Kazakh	647.732	0,47%	
			Azerbaijan	603.070	0,44%	
			Kumyk	503.060	0,37%	
			Yakut	478.085	0,35%	
			Uzbek	289.862	0,21%	
			Tuvan	263.934	0,19%	
			Karachay	218.403	0,16%	
			Balkar	112.924	0,08%	
			Turki	105.058	0,08%	
			Nogai	103.660	0,08%	
			Kyrgyz	103.422	0,08%	
			Altay	74.238	0,05%	
			Khaka	72.959	0,05%	
			Turkmen	36.885	0,03%	
			Gagauz	13.690	0,01%	
			Shor	12.888	0,01%	
			Dolgan	7.885	0,01%	
		Lainnya	20.000	0,01%		
		Mongol	Buryat	461,389	0,34%	
			Kalmyk	183,372	0,13%	
		Manchu-Tungu	Evenk	38.396	0,02%	
			Even	21.830	0,02%	
			Nanai	12.003	0,01%	
			Ulch	2.765	0,00%	
Udege	1.496		0,00%			
Oroch	596		0,00%			
Negidal	513		0,00%			
3.	Ural	Finno-Ugrik	Mordvin	774.237	0,54%	
			Udmurt	552.299	0,40%	
			Mari	547.605	0,40%	
			Komi	228.235	0,17%	
			Komi-Permyak	94.456	0,07%	

No.	Rumpun Bahasa	Subdivisi	Nama Etnis	Jumlah	Persentase terhadap Keseluruhan Populasi di Rusia
3.	Ural	Finno-Ugrik	Karelisan	94.456	0,17%
			Khanty	60.815	0,07%
			Finn	30.943	0,04%
			Estonia	20.267	0,02%
			Mansi	17.875	0,02%
			Vep	12.269	0,02%
			Sami	5.936	0,01%
			Izhori	1.771	0,00%
				266	0,00%
		Samoyed	Nenet	44.640	0,03%
			Selkup	3.649	0,00%
			Nganasan	862	0,00%
			Enet	227	0,00%
		Uralo-Siberia	Yukaghir	1.603	0,00%
			Chukchi	15.908	0,02%
Koryak	7.953		0,01%		
Itel'men	3.193		0,00%		
Chuva	1.002		0,00%		
Eskimo	1.738		0,00%		
Aleut	482	0,00%			
4.	Kaukasus	Chechen	1.431.360	1,04%	
		Avar	912.090	0,66%	
		Dargin	589.396	0,43%	
		Kabardian	516.862	0,38%	
		Lezgin	473.722	0,35%	
		Ingush	443.833	0,32%	
		Lak	178.630	0,13%	
		Georgia	157.803	0,11%	
		Tabarsaran	146.360	0,11%	
		Adyghe	124.835	0,09%	
		Circassian	73.184	0,05%	
		Abaza	43.341	0,03%	
		Rutul	35.240	0,03%	
		Agul	34.160	0,02%	
		Abkhaz	11.249	0,01%	
Tsakhur	12.769	0,01%			
5.	Bahasa Lainnya	Ibrani	156.801	0,11%	
		Assyria	11.084	0,01%	
		Ket	1.219	0,00%	
		Nivikh	4652	0,00%	

Sumber: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab5.xls

*Telah diolah kembali

Universitas Indonesia

Data pada tabel di atas diperoleh dari hasil sensus *Национальный состав населения Российской Федерации* (Nasional'nyj sostav naselenija Rossijskoj Federacii) (Komposisi Etnis Penduduk Federasi Rusia) tahun 2010. Perlu diakui bahwa tidak semua etnis yang tercatat di sumber asli dimasukkan ke dalam tabel tersebut dikarenakan keterbatasan penulis. Di dalam hasil sensus 2010, banyak kelompok etnis yang hanya memiliki anggota dalam jumlah ratusan, puluhan, bahkan satuan.

Tabel di atas disusun berdasarkan rumpun bahasa yang digunakan oleh masing-masing kelompok etnis. Ini dimaksudkan agar tabel di atas dapat menunjukkan berbagai macam bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok etnis di Rusia. Bahasa-bahasa itu tidak hanya berasal dari satu rumpun tapi dari beberapa rumpun bahasa yang tentunya berasal dari kebudayaan yang berbeda-beda.

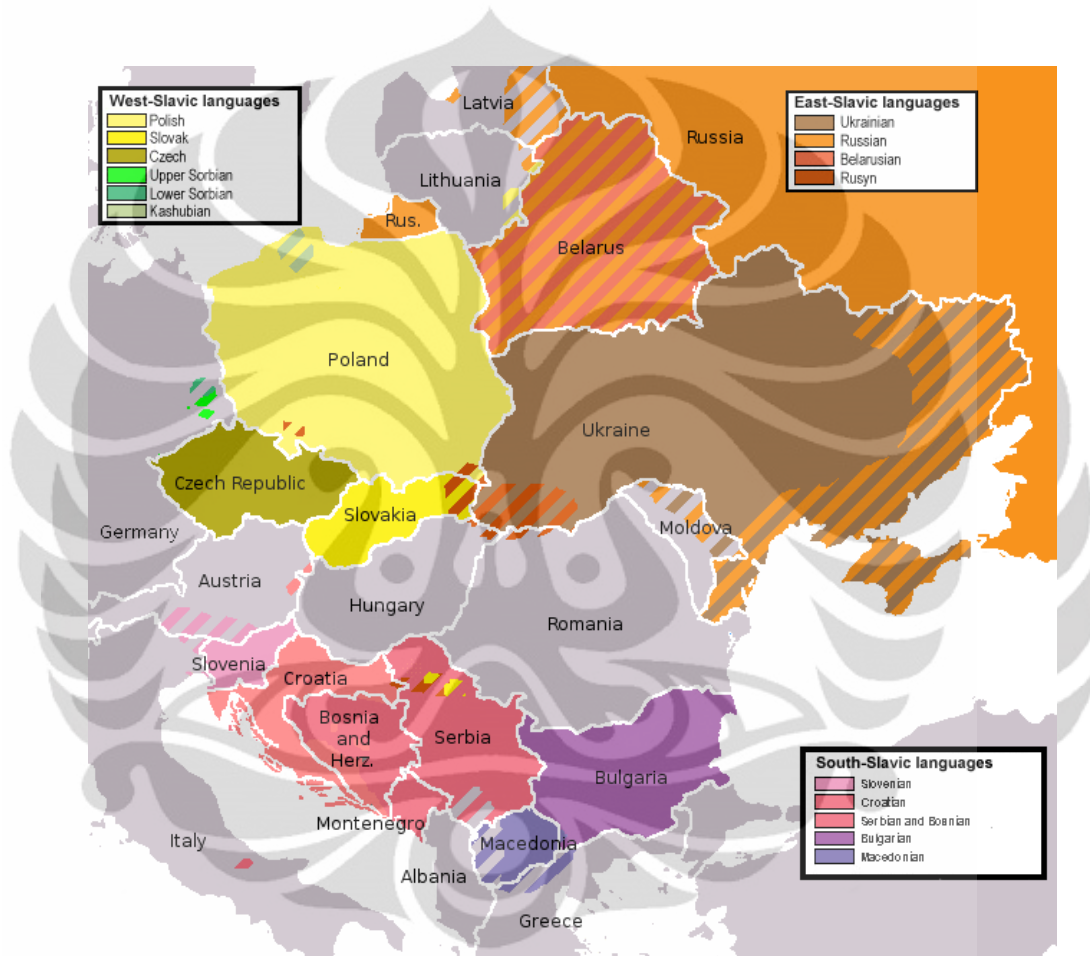
Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana gambaran sejarah asal mula dan persebaran kelompok-kelompok etnis di Rusia, akan dijabarkan dalam beberapa sub bab berikut.

2.1.1 Rumpun Slavia

Etnis mayoritas yang mendiami wilayah Rusia adalah etnis yang menggunakan bahasa Slavia (*Slavic language*). Di dalam kelompok yang lebih besar, bahasa Slavia masuk dalam kelompok bahasa Indo-Eropa. Menurut Orlov, masyarakat Slavia terbentuk kurang lebih 2000 tahun lalu, menurut data arkeologis, berasal dari daerah timur Jerman yakni dari Sungai Oder di sebelah barat, membentang sampai ke Pegunungan Karpatian di sebelah timur (Fahrurodji, 2005: 7). Melalui proses migrasi yang memakan waktu beratus-ratus tahun, bangsa Slavia pun menyebar ke daerah selatan, tengah, dan timur Eropa. Bangsa Slavia yang menyebar ke daerah selatan Eropa, seperti etnis Bolgars, Serbs, Khrovats, Slovens mendiami daerah selatan Danube, sedangkan bangsa Slavia yang menyebar ke daerah barat, seperti etnis Polandia, Vislan, Moravia, Slovakia, bermukim di daerah antara Laut Baltik dan Sungai Danube. Bangsa Slavia yang menyebar ke daerah timur Eropa terbagi menjadi tiga etnis, yaitu Ukraina, Belarusia, dan Rus. Etnis Rus sendiri sebenarnya etnis asli yang

mendiami daerah di sekitar Sungai Dneipr namun kemudian *di-Slavia-kan* oleh orang-orang Polandia yang bermigrasi ke daerah tersebut (Fahrurodji, 2005: 8). Berikut ini adalah peta yang menggambarkan persebaran bahasa-bahasa Slavia di beberapa negara Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Gambar 2.1 Peta Persebaran Rumpun Bahasa Slavia



Sumber: <http://www.freelang.net/families/maps/slavic-languages.png>

Masyarakat Rus berkembang dari masyarakat kesukuan menjadi masyarakat feodal. Perkembangan pertama pemerintahan masyarakat Rus adalah periode Kepangeranan (*Knyazhestvo*), yaitu sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pangeran (*knyaz*). Selanjutnya, sesuai dengan berkembangnya sistem kemasyarakatan yang lebih kompleks dan meluasnya daerah kekuasaan Rusia, Ivan IV “The Terrible” menggunakan istilah “Tsar” sebagai penguasa seluruh tanah Rus dan juga daerah-daerah sekitarnya. Setelah reformasi Peter Agung, Rusia

Universitas Indonesia

masuk ke dalam periode imperium atau kekaisaran (Fahrurodji, 2005: 18-20). Tak dapat dipungkiri bahwa etnis Rus adalah ‘tulang punggung’ dalam sejarah Rusia dan perkembangannya hingga hari ini (Fowkes, 2002: 28). Etnis Rus inilah yang kini menjadi etnis mayoritas dan tersebar hampir di seluruh wilayah negara Federasi Rusia.

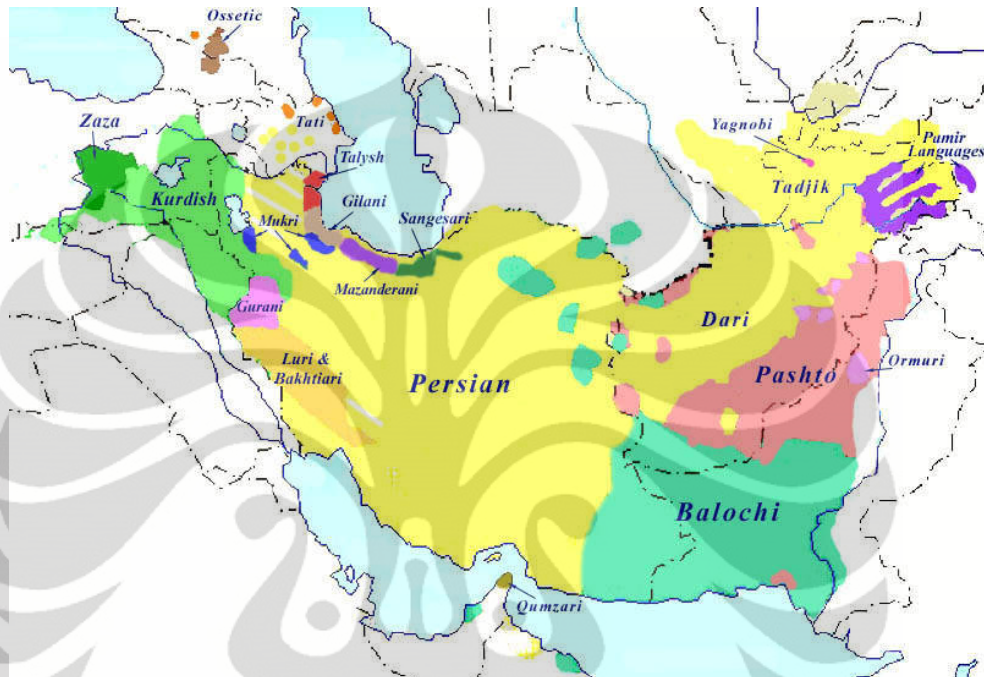
Nama ‘Rusia’ (“*Россия*” (Rossija)) merupakan perkembangan dari nama ‘Rus’ (“*Русь*” (Rus’)) (Fahrurodji, 2005: 8) karena itu etnis Rus juga disebut dengan etnis Rusia (*Russian people, Russian nation, Russian* (eng.)). Dalam bahasa Rusia, etnis Rusia disebut dengan ‘*русский*’ (russskij), sedangkan orang berkewarganegaraan Rusia disebut dengan ‘*россиянин*’ (rossijanin). Di dalam bahasa Inggris tidak ada perbedaan antara sebutan bagi etnis Rusia dengan orang berkewarganegaraan Rusia, yang juga disebut dengan *Russian*. Oleh karena itu, agar terhindar dari kerancuan antara *Russian* (orang Rusia) sebagai sebuah etnis dan *Russian* (orang Rusia) sebagai sebuah identitas kewarganegaraan, maka di dalam skripsi ini penulis cenderung menggunakan istilah ‘etnis Rus’ sebagai padanan untuk menyebut *russskij*.

2.1.2 Rumpun Iran

Kelompok etnis yang bahasanya memiliki hubungan dengan rumpun bahasa Iran adalah etnis Ossetia dan etnis-etnis lain yang populasinya lebih kecil, seperti etnis Tat, Talysh, serta Kurdi. Bahasa Iran, seperti halnya bahasa Slavia, termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa yang digunakan sejak lama oleh suku-suku nomaden yang menyebar di daerah Eurasia yang sangat luas. Beberapa dari suku-suku ini menyebar ke arah selatan dan membuat pemukiman permanen, sedangkan yang lain tetap menjadi suku nomaden dan menjelajahi padang-padang di daerah Eurasia sampai beberapa abad lamanya. Ketika terjadi serangan suku-suku Turki, suku-suku Iran terdesak ke Eropa Timur dan Eropa Tengah (Rezakhani, 2007). Di Rusia, etnis-etnis berbahasa Iran sebagian besar bermukim di daerah Kaukasia. Setelah penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Tsar pada abad XIX di daerah Kaukasia, etnis-etnis berbahasa Iran ini pun berada dalam kekuasaan Kekaisaran Rusia. Etnis dari rumpun Iran merupakan etnis minoritas yang jumlahnya dan persebarannya relatif lebih kecil daripada etnis-etnis dari

rumpun bangsa lainnya di Rusia. Seperti yang dapat dilihat dari peta di berikut ini, etnis rumpun Iran di Rusia hanya menghuni sebagian kecil daerah Kaukasus.

Gambar 2.2 Peta Persebaran Rumpun Bahasa Iran di Dunia



Sumber: <http://www.essex.ac.uk/larg/images/IranianLanguages.jpg>

2.1.3 Rumpun Altai

Ada tiga kelompok besar rumpun bahasa Altai di Rusia, yaitu bahasa Turki⁶, bahasa Mongol, dan Bahasa Manchu-Tungu⁷. Tidak ada catatan pasti

⁶ Bahasa Turki yang dimaksud di sini bukanlah bahasa Turki (*Turkish language* (Eng.) atau *Турецкий язык* (*Tureckij jazyk*) (Rus.)) yang digunakan di negara Turki, melainkan sebuah rumpun bahasa yang lebih tinggi (*Turkic language* (Eng.) atau *Тюркский язык* (*Tjurkskij jazyk*) (Rus.)).

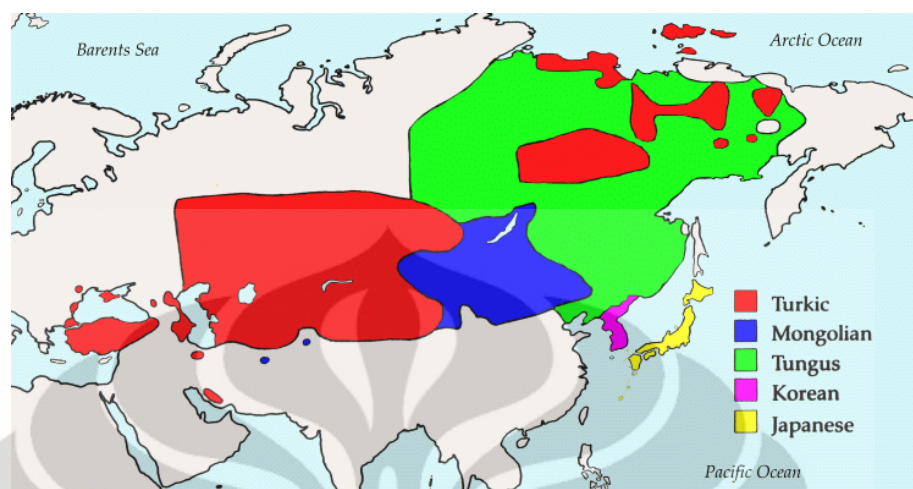
⁷ Bahasa Manchu-Tungu atau yang juga dikenal dengan nama bahasa Tungus (*Tungusic* (Eng.)) adalah bahasa yang digunakan oleh beberapa kelompok etnis yang sebagian besar merupakan masyarakat nomaden di Siberia dan daerah timur laut Cina. Etnis yang paling terkenal dari kelompok Tungus adalah etnis Manchu. Etnis Manchu dapat mempertahankan budaya dan bahasa mereka walaupun berada di bawah bayang-bayang kekaisaran-kekaisaran besar yang ingin menguasai tanah mereka, seperti etnis Tatar dari Rusia, Hungaria Khanate dan Kekaisaran Yuan dari Mongol, serta beberapa dinasti dari Korea. Melalui peninggalan-peninggalan dan catatan-catatan etnis Manchu inilah para sarjana dapat meneliti kelompok etnis dan bahasa Tungus. Catatan mengenai kelompok etnis Tungus dapat ditemukan di jurnal penjelajah Rusia sejak abad XVI. Ketika Kekaisaran Rusia ingin menguasai wilayah Siberia, Tsar mengutus tentara, pedagang, dan penduduk sipil dalam jumlah besar ke wilayah Tungus. (<http://www.dartmouth.edu/~trg/languages/preface.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2012 pukul 10.30 WIB)

mengenai sejarah awal persebaran etnis-etnis dari ketiga kelompok bahasa tersebut di Rusia. Identitas etnis-etnis berbahasa Altai, terutama etnis Turki dan Mongol, di Rusia yang sekarang adalah percampuran antara budaya ketiganya yang berlangsung selama kurang lebih dua milenium melalui proses migrasi maupun invasi. Mereka berasal dari daerah selatan Siberia dan Mongolia sekarang (Dickens, 1990: 1). Ciri fisik mereka susah diamati, yang paling dapat membedakan mereka dari rumpun bangsa lainnya adalah kesamaan bahasa yang mereka gunakan (Brown, Kaser, dan Smith (ed.), 1994: 39).

Pada abad VI, etnis-etnis Turki mereka bermigrasi ke barat dan selatan dari tanah leluhur mereka, menyebar dari Pegunungan Ural sampai Mongolia dan memanjang ke selatan, ke daerah Asia Tengah. Etnis Turki kemudian melebur dengan etnis Mongol. Sebagai hasil dari invasi bangsa Arab pada akhir abad VII, sebagian besar etnis-etnis Turki dan Mongol memeluk agama Islam. Pada masa Kekaisaran Mongol, peradaban di daerah Asia Tengah berkembang dengan cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya kota-kota penting seperti Bukhara, Khiva, dan Tashkent. Pada abad XIX, Kekaisaran Rusia menaklukkan kota-kota tersebut dan dimulailah sejarah baru kehidupan bangsa Turki di bawah kekuasaan Rusia. (Dickens, 1990: 1-3).

Di Rusia, banyak sekali kelompok etnis yang menggunakan bahasa dari rumpun Altai, diantaranya adalah Tatar, Bashkir, Chuvash, Tuvinia, Kумыk, Karachay, Balkar, Nogay, Khahass, Gagauz, Altay, Yakut, Dolgan, Tofa, Evenk, Even, Buryat, Kalmyk. Saat ini, masyarakat dari rumpun bangsa Turki dan Mongol banyak mendiami daerah Asia Tengah, Siberia, Kaukasus, dan daerah Volga, seperti yang dapat dilihat dari peta berikut.

Gambar 2.4 Peta Persebaran Rumpun Bahasa Altai di Dunia



Sumber: <http://starling.rinet.ru/maps/maps/Altaic.gif>

2.1.4 Rumpun Kaukasus

Abkhazia, Chechen, Avar, Dargin, Kabardia, Lezgin, Ingush, Laks, Tabaran, Adyghe, Circassia, Abazas, Rutuls, Aguls, Tsakhur adalah etnis-etnis yang berbicara dalam bahasa Kaukasus. Seperti namanya, etnis-etnis berbahasa Kaukasus ini banyak bermukim di daerah Kaukasia, yaitu sebuah daerah yang diapit oleh Laut Hitam dan Laut Kaspia, serta dilewati oleh pegunungan Kaukasus yang membelah daerah ini menjadi Kaukasia Utara dan Kaukasia Selatan. Orang Rusia menyebut orang-orang yang tinggal di daerah Kaukasia Utara dengan sebutan *горский* (*gorskij*) (orang gunung) (Omrod dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 448). Sebagai daerah yang menyimpan banyak sumber daya alam dan ditinggali oleh berbagai etnis dengan budaya serta agama yang berbeda, Kaukasus adalah daerah yang sering dilanda konflik. Tercatat beberapa konflik terjadi di daerah ini, seperti Perang Kaukasia (1817-1864), Perang Chechnya Pertama (1994-1996), dan Perang Chechnya Kedua (1999-2009). Peta berikut ini memperlihatkan kompleksitas etnis yang tinggal di daerah Kaukasus. Di peta ini terlihat bahwa daerah Kaukasus tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi etnis-etnis Kaukasus, tapi juga etnis-etnis Iran, Mongol, dan Turki.

Gambar 2.4 Peta Persebaran Kelompok-Kelompok Etnolinguistik di Wilayah Kaukasus



Sumber: <http://www.freelang.net/families/maps/tn-caucasus-ethnolinguistic-groups.png>

2.1.5 Rumpun Ural

Etnis-etnis berbahasa Ural banyak ditemui di daerah Siberia dan daerah Volga. Bahasa Ural terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Finno-Ugric, Samoyed, dan Yukaghir. Etnis-etnis yang menggunakan bahasa Ural antara lain adalah Khanty, Mansi, Sami, Nganasan, Enets, Selkup, Nenets, Komi, Komi-Permyak, Udmurt, Mari, Moksha, Erzya, Karelian, Vepsi, Ingrian-Livvi, Chukchi, Koryak, Intel'men, Inuit, Aleut, Yukagiry, Kety. Persebaran bahasa Ural di dunia dapat dilihat melalui peta berikut ini.

Gambar 2.5 Peta Persebaran Rumpun Bahasa Ural di Dunia



Sumber <http://media-3.web.britannica.com/eb-media/30/2030-004-41A16422.gif>

Sama seperti daerah Kaukasus, daerah Siberia juga didiami oleh berbagai macam etnis. Tidak hanya etnis berbahasa Ural tapi juga etnis lain seperti etnis berbahasa Turki (Dolgan dan Tofalar). Orang Rusia menyebut orang-orang yang berasal dari daerah Siberia dengan sebutan *малые народы севера* (*malye narody severa*) (masyarakat minoritas dari utara). Awal hubungan Siberia dan Rusia terjalin melalui perdagangan. Barang-barang komoditi dari Siberia, seperti bulu, gading walrus, dan hasil hutan Siberia menjadi barang mahal di Moskow. Pada tahun 1581, Kekaisaran Rusia menyerang Kuchum Khanate dan sejak saat itu daerah Siberia berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia (Fondahl dalam Bremmer dan Taras (ed.), 2002: 480-482).

2.2 Sejarah Politik Bahasa di Rusia

Sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, amat penting bagi Rusia untuk menyatukan rakyatnya yang terdiri dari ratusan kelompok etnis yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda. Salah satu cara untuk menyatukan rakyat Rusia yang sangat plural adalah melalui budaya itu sendiri. Asimilasi kebudayaan etnis mayoritas terhadap kebudayaan etnis-etnis minoritas menjadi cara yang paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan Rusia di daerah-daerah seperti Siberia, Asia Tengah, dan Kaukasus pada masa Kekaisaran. Bahasa sebagai salah satu unsur budaya menjadi kunci untuk keberhasilan strategi asimilasi ini. Pada masa Uni Soviet pun politik bahasa tetap menjadi alat untuk menciptakan budaya nasional yang seragam (Dietrich, 2005:1).

2.2.1 Politik Bahasa pada Masa Kekaisaran

Pada awal pembentukannya, wilayah Rusia tidak seluas seperti yang kita ketahui saat ini. Bentuk pemerintahan awal masyarakat Rus adalah Kepangeranan yang berpusat di Kiev. Namun, pada abad XIII, Kiev mengalami kemunduran sebagai akibat dari perpecahan internal dan serangan dari Mongol. Ketika Kiev mengalami kemunduran, muncul pusat pemerintahan baru di Moskow. Moskow, yang dibangun oleh Pangeran Dolgoruki pada pertengahan abad XII, pada awalnya hanyalah sebuah kota biasa (Walsh, 1958: 54). Kota yang berada di daerah antara jalur-jalur perdagangan ini bisa dibilang hanya sebuah kota kecil jika dibandingkan dengan Astrakhan, Kazan, atau Novgorod. Pada saat itu, penduduk Moskow adalah penduduk homogen yang terbentuk dari etnis Rus.

Etnis Rus sangat erat kaitannya dengan Kristen Ortodoks yang diadopsi menjadi agama negara oleh Pangeran Vladimir dari Dinasti Ryurik pada tahun 988 (Walsh, 1958: 38). Kristen Ortodoks dapat berasimilasi dengan budaya Rus sebelumnya yang berasal dari budaya pagan dan hal ini memberi corak tersendiri terhadap kekristenan di Rusia (Fahrurudji, 2005: 43). Pengadopsian Kristen Ortodoks membawa dampak yang besar bagi kehidupan bangsa Rus. Diadopsinya Kristen Ortodoks membuat Rusia berbeda secara budaya dari bangsa Eropa lainnya, khususnya Eropa Barat, yang lebih banyak mengadopsi Katolik Roma. Pengadopsian Kristen Ortodoks juga memberikan dampak pada sistem abjad

Rusia, yaitu abjad Sirilik. Abjad Sirilik yang diadopsi dari abjad Yunani diperkenalkan pertama kali oleh Saint Kiril dan Methodius, dua orang misionaris dari Bizantium (Fahrurodji, 2005: 39-40).

Setelah kejatuhan Konstantinopel, Moskow memproklamkan diri sebagai Roma Ketiga. Doktrin Roma Ketiga ini membuat bangsa Rus percaya bahwa mereka adalah bangsa yang diutus Tuhan untuk membawa kebenaran dan oleh karena itu mereka memiliki semangat messianisme atau penyelamat dunia (Fahrurodji, 2005: 40). Doktrin ini menjadi semangat bangsa Rus untuk menyebarkan Kristen Ortodoks dengan cara menaklukan wilayah lain. Bangsa Rus sangat menghormati Kristen Ortodoks dan menganggap bahwa Kristen Ortodoks lebih suci dan lebih benar daripada Katolik maupun Protestan (Weeks, 2004: 472). Oleh karena itu, etnis Rus percaya bahwa kebudayaan mereka lebih tinggi dan lebih ‘tercerahkan’ daripada kebudayaan lain di dunia.

Seiring dengan berjalannya waktu, Moskow berkembang menjadi sebuah kekaisaran yang besar dan kuat. Sejak Tsar Ivan IV melakukan ekspansi dan berhasil menaklukan wilayah-wilayah seperti Kazan, Astrakhan, serta sebagian daerah Siberia, Rusia menjelma menjadi sebuah negara multi-etnis (Weeks, 2004: 471). Ekspansi terus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin setelah Ivan IV. Di bawah Dinasti Romanov (1613-1917), Kekaisaran Rusia berhasil menyatukan wilayah Baltik, Laut Hitam, Kaukasus, Asia Tengah, Siberia, dan terus memanjang ke Timur sampai ke Pulau Sakhalin yang langsung berbatasan dengan Jepang.

Untuk melegitimasi kekuasaannya di daerah-daerah, Kekaisaran Rusia tidak hanya menggunakan kekuatan militer tapi juga menggunakan kebijakan *rusifikasi*. Istilah *rusifikasi* (*Obrusenie*) digunakan untuk menjelaskan proses penyebaran budaya Rusia kepada etnis-etnis selain etnis Rus. Etnis Rus percaya bahwa mereka telah memberikan kebudayaan yang lebih ‘tinggi’ yang berakar dari Kristen Ortodoks kepada masyarakat yang memiliki kebudayaan lain yang dinilai lebih ‘rendah’ (Wixman dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 431). Kebijakan *rusifikasi* ini dibuat atas nama etnis Rus dan hal ini memberikan asumsi bahwa etnis Rus lebih unggul dari subjek-subjek tsar yang lain. Dengan demikian, masyarakat yang menerima atau mengadopsi budaya Rus dan Kristen Ortodoks

akan menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat kebudayaan ‘tinggi’, termasuk di dalamnya adalah pengadopsian bahasa Rusia dan abjad Sirilik.

Kebijakan *rusifikasi* tidak semata-mata digunakan untuk menunjukkan keunggulan budaya Rus dibanding budaya lain. Sering kali, kebijakan ini digunakan sebagai alat politik untuk menjaga daerah kekuasaan Kekaisaran Rusia dari ‘ancaman’ atau pengaruh dari bangsa lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *rusifikasi* bahasa (*linguistic russification*) adalah sebuah politik bahasa.

Hal ini dapat dilihat pada saat Pemerintah Tsar dan Gereja Kristen Ortodoks menetapkan tradisi tulis dan bahasa liturgi bagi masyarakat yang berbahasa Turki dan Hunnic di daerah Volga Tengah. Kebijakan ini diambil agar masyarakat tersebut memeluk Kristen Ortodoks dan tidak terpengaruh oleh budaya Tatar yang beragama Islam (Wixman dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 426). Pada akhir abad XV segala hal yang berhubungan dengan budaya, bahasa, dan etnis Tatar dianggap sebagai penyebaran Islam (Wixman dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 422). Saat itu bangsa Tatar masih dianggap sebagai bangsa yang besar sehingga kedekatan mereka secara budaya dengan etnis-etnis di daerah Volga Tengah dianggap dapat mengancam Kekaisaran Rusia.

Rusifikasi juga terjadi di provinsi-provinsi Barat, seperti Belarusia, Latvia, dan Lithuania. Pada tahun 1869, seorang pejabat Kementerian Pendidikan Kekaisaran Rusia menulis:

“...*Lithuanians, Latvians and even Jews are eager to get Russified (obruset’), all of them understand and nearly all speak Russian. But even if there are those among them who do not speak Russian, then it is they who are obliged to learn the language of Government, not vice versa. w’ dikari i [a]zychniki), while we are not missionaries among savages. We need not come down to their dialects and notions; rather, we should make them get up to our level (podniat’sia k nam)...*” (Dolbilov, 2007: 151)

“...Orang Lithuania, Latvia, dan bahkan Yahudi berkeinginan untuk *di-Rusia-kan (obruset’)*, mereka semua mengerti dan hampir semua berbicara dalam bahasa Rusia. Namun, jika diantara mereka ada yang tidak berbicara dalam bahasa Rusia, maka mereka berkewajiban untuk belajar bahasa Pemerintah, bukan sebaliknya. Semua bangsa minoritas ini (*narodtsy*) sebagian bukanlah pemeluk pagan dan barbar (*nekakienibud’ dikari i [a]zychniki*), namun kita bukan misionaris diantara orang-orang barbar. Kita tidak perlu mendalami dialek atau karakter mereka, malah, kita seharusnya membuat mereka meningkatkan diri ke level kita (*podniat’sia k nam*)...”

Rusifikasi tidak semata-mata ingin membuat orang-orang Latvia atau Lithuania menjadi orang Rusia. Kebijakan ini diambil juga karena alasan politis. Provinsi-provinsi Barat secara budaya memiliki hubungan lebih dekat dengan Polandia yang beragama Katolik daripada dengan Rusia. Di mata pemerintah Tsar, Polandia menjadi ancaman bagi stabilitas dan integritas Kekaisaran Rusia. Oleh karena itu, Kekaisaran Rusia melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi pengaruh budaya Polandia di daerah-daerah sekitarnya (Weeks, 2004: 475).

Setelah terjadinya pemberontakan di Belarusia pada tahun 1839, pemerintah Tsar mengganti bahasa resmi setempat dari bahasa Polandia menjadi bahasa Rusia (Urban dan Zaprudnik dalam Bremmer dan Taras, 1993: 101). Pemerintah Tsar juga menetapkan abjad Sirilik sebagai abjad bahasa Lithuania dan melarang penulisan bahasa tersebut dalam abjad Latin sebagai reaksi atas terjadinya pemberontakan di Polandia pada tahun 1863 (Krickus dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 161). Bahkan, bahasa setempat dilarang digunakan di tempat-tempat publik (Dolbilov, 2007: 151).

Hal ini juga terjadi di Ukraina, penggunaan bahasa Ukraina untuk kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Penerbitan buku, jurnal, dan koran; pertunjukan teater; bahkan pembelajaran dalam bahasa Ukraina juga dilarang. Bahasa yang digunakan dalam pengadilan maupun pemerintahan lokal adalah bahasa Rusia. Seperti halnya Polandia, pemerintah Tsar menganggap bahwa kebangkitan budaya etnis Ukraina akan menumbuhkan semangat nasionalisme yang pada akhirnya dapat mengganggu integritas wilayah Kekaisaran Rusia. Jika Ukraina memisahkan diri, maka hal itu akan mengganggu eksistensi seluruh Kekaisaran (Zhurzhenko, 2002: 4).

Walaupun *rusifikasi* tidak hanya terbatas pada politik bahasa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa berperan penting di dalamnya. Pemerintahan Tsar adalah sebuah pemerintahan yang didasarkan atas slogan “otokrasi, ortodoksi, dan nasionalisme” yang dapat diartikan sebagai “satu Tsar, satu agama, satu bahasa” (Lamont, 1952: 103). Seperti yang ditulis oleh Harold Issac, bahasa, budaya, dan sejarah yang sama adalah identitas kelompok yang paling dasar (Krickus dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 160). Melalui bahasa, sebuah masyarakat dapat

mendominasi masyarakat lainnya dan itulah yang ditunjukkan oleh etnis Rus sebagai inti dari Kekaisaran Rusia.

2.2.2 Politik Bahasa pada Masa Uni Soviet

Uni Soviet adalah sebuah negara yang didirikan dengan cita-cita membentuk sebuah tatanan masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan, sesuai dengan nilai-nilai Marxisme dan Leninisme. Namun, pada faktanya, persoalan yang dihadapi bukan hanya persoalan mengenai kelas-kelas atau strata sosial di dalam masyarakat. Sebagai sebuah negara yang mewarisi wilayah kekuasaan sekaligus rakyat dari Kekaisaran Rusia, Uni Soviet juga menghadapi persoalan etnisitas.

Pada Kongres Kedua Partai Pekerja Sosial-Demokrat Rusia (1903) diproklamkan bahwa “hak yang sama diperuntukan bagi seluruh rakyat tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, dan bangsa” termasuk juga “hak bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan dalam bahasa daerah masing-masing,... sebagai pengantar agar bahasa daerah memiliki kedudukan yang sama dengan bahasa nasional di semua institusi lokal, publik, maupun negara” (Zisserman-Brodsky, 2003: 20). Hal ini menunjukkan bahwa masalah etnisitas telah menjadi perhatian bahkan sebelum Uni Soviet didirikan. Ketika kelompok-kelompok etnis bergabung dan membantu kesuksesan rezim Soviet, mereka berharap bahwa pemerintahan yang baru nantinya akan memberikan mereka kemerdekaan atau setidaknya status otonomi (Ornstein, 1959: 1). Naiknya rezim Soviet memberikan harapan kepada kelompok-kelompok etnis bahwa mereka tidak akan lagi tertindas seperti pada masa Kekaisaran. Lenin sendiri beranggapan bahwa pengakuan terhadap hak-hak etnis akan membentuk sebuah negara yang stabil (Bremmer dan Taras, 1993: 9).

Secara umum, Lenin mendukung kebijakan otonomi daerah tapi ia dan kaum Bolshevik⁸ lainnya tetap menginginkan ide-ide Marxisme menjadi pijakan

⁸ Pada awalnya, Bolshevik adalah bagian dari Partai Pekerja Sosial-Demokrat Rusia (RSDRP). Pada Kongres II RSDRP (Agustus 1903) terjadi perbedaan pendapat mengenai karakter dan struktur partai dan membelah RSDRP menjadi dua kubu. Kubu mayoritas disebut dengan Bolshevik (*bolshe* (Rus.): lebih besar) sedangkan kubu minoritas disebut dengan Menshevik (*menshe* (Rus.): lebih kecil). Kaum Bolshevik adalah sayap partai yang beraliran radikal, sedangkan Menshevik lebih moderat. Setelah berhasil memenangkan Perang Saudara 1918-1920,

bagi setiap kelompok etnis di Uni Soviet. Oleh karena itu, pada tahun 1920-an, Lenin mengeluarkan slogan *national in form, socialist in content* (bentuk etnis, isi sosialis) yang diimplementasikan dalam kebijakan *korenizatsiya* (nativisasi atau pengakaran) (Bremmer dan Taras, 1993: 10). Melalui *korenizatsiya*, pemerintah Uni Soviet berharap bahwa pada suatu saat perbedaan-perbedaan etnis tersebut akan melebur dan rakyat Uni Soviet menjadi satu masyarakat homogen dengan budaya dan bahasa yang sama, sesuai dengan cita-cita sosialisme (Lamont, 1952: 112).

Walaupun *korenizatsiya* tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melindungi budaya lokal, namun kebijakan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan kelompok-kelompok etnis di Uni Soviet. Angka penduduk buta aksara menurun (Kaiser dalam Kesici, 2011: 41). Kelompok-kelompok etnis berhak mendapatkan pendidikan dalam bahasa daerahnya masing-masing, meskipun isi dari bahan pembelajaran ditentukan oleh pemerintah pusat (Zisserman-Brodsky, 2003: 20). *Korenizatsiya* memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok etnis di Uni Soviet untuk mengembangkan bahasa daerah sebagai alat untuk membantu mereka menuju masyarakat industrialis yang modern (Ornstein, 1959: 2).

Akan tetapi, pada perkembangannya, *korenizatsiya* tidak membuat kelompok-kelompok etnis melebur menjadi satu masyarakat Soviet, tapi malah menimbulkan semangat nasionalisme di dalam diri etnis-etnis tersebut, khususnya di daerah-daerah Asia Tengah dan Kaukasus. Hal ini dapat berujung pada keinginan mereka untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dan menjadi awal bagi terjadinya disintegrasi. Untuk mengatasinya, Bolshevik kemudian mengasosiasikan gejala nasionalisme pada kelompok-kelompok etnis sebagai timbulnya semangat borjuisme yang menjadi lawan masyarakat proletar Soviet. Bolshevik menyebutnya sebagai “*bourgeois nationalism*” (borjuis nasionalisme) (Ornstein, 1959: 2).

Untuk menghilangkan borjuis nasionalisme, maka perbedaan antara kelompok-kelompok etnis harus dihilangkan agar semangat nasionalisme yang

pengaruh Bolshevik semakin kuat. Sejak Kongres Partai XIV pada 1925, Bolshevik menjadi Partai Komunis Uni Soviet (KPSS). (Fahrurudji, 2005:129; Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. (B.) (ed.), 2006: 278).

berasal dari identitas budaya mereka tidak akan muncul lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan *common culture* bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Akhirnya, sebagai etnis mayoritas yang dianggap memiliki budaya unggul, etnis Rus, dipilih menjadi ‘panutan’ bagi etnis lainnya di Uni Soviet (Simon dalam Kesici, 2011: 41), termasuk bahasa yang mereka gunakan. V. V. Vinogradov (1895-1969) dalam bukunya, *Velikij russkij jazik*, menulis:

“The Russian language as language of high culture is the ideal and pattern for the languages of the other nationalities. From it the deprive the vocabulary and phraseology relating to the ideas of Marxism-Leninism and to the process of Socialist construction.... The Russian language has become for the languages of the other nations within the borders of the U.S.S.R. [A] source, a rich reservoir of new concepts, new system of visualizing reality.” (Ornstein, 1959: 5)

“Bahasa Rusia sebagai bahasa dari sebuah kebudayaan unggul adalah bahasa ideal dan pola bagi bahasa bangsa-bangsa (etnis-etnis) lain. Dari bahasa tersebut mereka memperoleh kosakata dan fraseologi yang berhubungan dengan ide-de Marxisme-Leninisme dan proses pembentukan Sosialis.... Bahasa Rusia telah menjadi bahasa bagi bangsa-bangsa (etnis-etnis) lain di dalam wilayah U.S.S.R.. Sebuah sumber, gudang yang kaya bagi konsep-konsep baru, sistem baru untuk memvisualisasikan kenyataan.”

Pada tahun akhir tahun 1930-an, pemerintah Uni Soviet mulai melakukan *rusifikasi*, sama seperti yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kekaisaran Rusia. *Rusifikasi* dimulai dengan menutup institusi-institusi kedaerahan dan menghapus prasyarat ‘harus dapat berbicara dalam bahasa daerah setempat’ bagi para pegawai pemerintahan lokal (Dave dalam Kesici, 2011: 41). Pada tahun 1938, bahasa Rusia ditetapkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah (Zisserman-Brodsky, 2003: 25). Bahasa-bahasa non-Slavia dipaksa mengadopsi abjad Sirilik dalam sistem penulisan mereka (Ornstein, 1959: 2-3). Mulai tahun 1975, disertasi yang dibuat oleh sarjana-sarjana di daerah-daerah harus diterjemahkan dalam bahasa Rusia (Muiznieks dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 188). Pada tahun 1956, 80% dari 58.034 publikasi yang diterbitkan di Uni Soviet dicetak dalam bahasa Rusia (Ornstein, 1959: 14).

Di daerah-daerah, bahasa Rusia dengan cepat mengganti peran bahasa lokal. Di sekolah-sekolah di Armenia, sejak tahun 1930-an jam pelajaran bahasa Rusia dengan cepat mengalami peningkatan dan menggantikan bahasa Armenia

(Dudwick dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 269-270). Di Ukraina, antara tahun 1980-1985 hanya ada empat sekolah dengan pengantar bahasa Ukraina. Pada tahun 1987, hanya 14% dosen di Universitas Kiev yang di perkuliahannya menggunakan bahasa Ukraina (Krawchenko dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 89). Di Latvia, pada tahun 1980-an, murid-murid di sekolah dengan pengantar bahasa Latvia membutuhkan empat sampai enam jam pelajaran bahasa Rusia dan harus mengikuti ujian akhir dalam bahasa Rusia. Kebalikannya, murid-murid di sekolah dengan pengantar bahasa Rusia hanya membutuhkan dua jam pelajaran bahasa Latvia dan mereka tidak perlu mengikuti ujian akhir dalam bahasa Rusia (Muizniek dalam Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 188). Di Bishkek, ibukota Kirgizstan, tidak ada sekolah baru dengan pengantar bahasa Kirgiz yang dibuka sejak tahun 1930-an dan pada tahun 1980-an hanya ada tiga sekolah yang menggunakan bahasa Kirgiz sebagai bahasa pengantar diantara 69 sekolah yang ada. Pada akhir kekuasaan Soviet, tercatat hanya 4% buku berbahasa Kirgiz diantara 5,6 juta buku di Perpustakaan Lenin di Bishkek (Huskey dalam Bremmer dan Taras (ed.), 402). Di Kazakhstan, hanya ada dua sekolah dengan pengantar bahasa Kazakh pada zaman Uni Soviet (Fierman dalam Kesici, 2011: 41) dan dari 380 koran hanya 145 koran yang dicetak dalam bahasa Kazakh (Ornstein, 1959: 15).

Akibat *rusifikasi* yang dilakukan pada zaman Uni Soviet terjadi penurunan angka penutur bahasa daerah dan bahasa daerah menjadi termarginalisasikan di daerahnya sendiri. Di daerah Kamchatka, jumlah penutur bahasa Kamchadal secara signifikan mengalami penurunan dan hampir semuanya berbicara dalam bahasa Rusia (Ornstein, 1959: 6). Di Armenia, pada tahun 1927, 98,5% murid belajar di sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Armenia, sedangkan pada tahun 1987, persentase ini menurun menjadi 75% (Dudwick dalam Bremmer dan Taras, 1993: 270). Pada tahun pelajaran 1988-1989 hanya 47,5% murid di Ukraina yang belajar di sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Ukraina (Krawchenko dalam Bremmer dan Taras (ed.), 89). Banyak diantara murid-murid non-Rus yang cerdas gagal dalam ujian bahasa ibu masing-masing (Ornstein, 1959: 5). Para orang tua di daerah-daerah lebih banyak mengirim anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah dengan pengantar bahasa Rusia daripada bahasa daerahnya karena mereka ingin agar anaknya mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Kosakata bahasa Rusia banyak menggantikan kosakata bahasa daerah. Contohnya, dalam beberapa bahasa Balto-Finnic, seperti kata *siätoi* (cuaca buruk) dalam bahasa Olonets digantikan oleh kata dalam bahasa Rusia *bespagoditsa*, kata *selle takaz* (dulu) dalam bahasa Votic digantikan dengan bahasa Rusia *tomu nazad*. Hal ini juga terjadi di dalam bahasa Ukraina, kata-kata yang dinilai terlalu dekat dengan bahasa atau dialek Polandia sengaja diganti dengan bahasa Rusia. Contohnya, kata *adresa* (alamat) dalam bahasa Ukraina digantikan dengan bahasa Rusia *adres*, *oseredok* (tengah) digantikan dengan *tseñtr*, *gudzik* (kenop) digantikan dengan *knopka*, dan kata *pervent'* (elemen) digantikan dengan kata *element* (Ornstein, 1959: 6-7).

Bahasa-bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Turki dan Iran menjadi target utama *rusifikasi*. Ini terjadi karena Uni Soviet secara sengaja menghindari munculnya semangat Pan-Turkism di daerah Kaukasus dan Asia Tengah. Banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Arab-Persia digantikan dalam bahasa Rusia. Contohnya, kata *inqilab* (revolusi) digantikan oleh bahasa Rusia *revolutsiya*, kata *firqa* (partai) digantikan oleh *partiya*, *džumhuriya* (republik) digantikan oleh *respublika*. Pada periode 1932-40 saja persentase bahasa Rusia naik dari 5% menjadi 15% di dalam bahasa-bahasa rumpun Turki dan Iran, sedangkan persentase kosakata yang berasal dari bahasa Arab-Persia menurun dari 37,4% menjadi 25% (Ornstein, 1959: 6-7).

Bahasa Rusia tidak hanya mendominasi bidang pendidikan, namun juga mendominasi bidang-bidang lainnya. Di bidang kesenian, dari delapan teater di Belarusia hanya tiga diantaranya yang melakukan pertunjukan dalam bahasa Belarusia, sedangkan di Udmurt, di antara empat teater hanya satu yang melakukan pertunjukan dalam bahasa setempat. Hal yang sama terjadi di bidang pemerintahan. Sebuah artikel di koran *Kazakhstanskaya Pravda* menyampaikan keluhan mengenai organ-organ pemerintah setempat yang hanya menggunakan bahasa Rusia. Bahkan, surat keluhan yang disampaikan dalam bahasa Kazakh dibalas dalam bahasa Rusia (Ornstein, 1959: 16). Pengadopsian istilah-istilah teknis dan ilmu alam juga menyebabkan banyaknya pinjaman kosakata bahasa Rusia di dalam bahasa-bahasa daerah. Di dalam Kamus Istilah Kimia yang diterbitkan pada tahun 1954 di Stalinabad, Tadjikistan, misalnya, dari 3200 kata, 2040 di antaranya

merupakan pinjaman langsung dari bahasa Rusia, 640 kata merupakan gabungan antara bahasa Rusia dan bahasa Tadjik, sedangkan hanya 550 kata yang langsung berasal dari bahasa Tadjik (Ornstein, 1959: 8). Migrasi orang-orang Rus ke daerah-daerah non-Rus dan kebijakan ekonomi Uni Soviet yang tersentralisasi juga menyebabkan bahasa Rusia dengan cepat menggantikan peran bahasa asli di daerah-daerah.

Dari contoh-contoh yang disebutkan sebelumnya menunjukan bahwa *rusifikasi* yang dilakukan oleh pemerintah Uni Soviet melebihi *rusifikasi* yang pernah dilakukan oleh pemerintahan Tsar. Pemimpin-pemimpin Uni Soviet, seperti Stalin dengan *sliyanie*⁹-nya, Khrushchev dengan *Program*¹⁰-nya, maupun Breznev dengan *sovietskij narod*¹¹ (bangsa Soviet)-nya mendukung terlaksananya *rusifikasi* (Zisserman-Brodsky, 2003: 29; Bremmer dan Taras (ed.), 1993: 11). Ini berarti, selama Soviet berkuasa, *rusifikasi* dijalankan selama sekitar lima puluh tahun lamanya.

Misi messianisme rupanya masih ada di dalam diri bangsa Rusia, walaupun pada zaman Uni Soviet ide yang mereka sebarkan bukan lagi tentang ‘kebenaran’ Kristen Ortodoks, melainkan tentang ‘kebenaran’ sosialisme. Seperti yang dikatakan oleh Mikhail Kalinin (1875-1946), pemimpin presidium Komisi Sentral Seluruh Uni Soviet, bahwa telah menjadi kebijakan Soviet untuk mengajarkan orang-orang di stepa-stepa Kirgzytan, petani kapas di Uzbekistan, dan tukang kebun Turkmenistan untuk menerima keteladanan pekerja-pekerja Leningrad (Kolarz: 1955, 5-7). Walaupun di dalam Konstitusi Uni Soviet terdapat pengakuan

⁹ Sliyanie berarti penggabungan (fusi). Kebijakan *sliyanie* Stalin ini bertalian dengan dua kebijakan lainnya, yaitu *rastsvet* (kemekaran atau perkembangan) dan *sblizhenie* (pendekatan). Ketiga kebijakan ini merupakan manifestasi politik etnis yang dilakukan pada masa Stalin untuk membangkitkan ekspresi identitas kelompok-kelompok etnis minoritas (Simonsen, 1999:1070-1071)

¹⁰ Pada Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-22 dikeluarkan sebuah *Program* baru sebagai landasan bagi politik bangsa (etnis) negara Uni Soviet. Kebijakan ini menekankan bahwa komunisme akan membuat bangsa-bangsa di Uni Soviet bersatu. Dengan semakin dekatnya hubungan antar bangsa dan semakin tingginya kesadaran akan tugas negara, maka manifestasi parochialisme dan egoisme bangsa dan ditanggulangi sukses. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama kebijakan Khrushchev adalah rufikasi bahasa dan kultural serta migrasi internal (Zisserman-Brodsky, 2003: 26).

¹¹ Konsep *sovietskij narod* dilontarkan oleh Brezhnev pada Kongres Partai Komunis Uni Soviet ke-24. *Sovietskij narod* didentikan dengan ‘pembentukan komunitas sejarah baru’ sebagai hasil dari saling berbagi pengalaman dan ideologi Komunisme. Menurut Brezhnev, masyarakat Soviet seharusnya berkembang secara individu namun pada waktu yang sama mereka saling mempersatukan diri. Akan tetapi, pada kenyataannya bahasa Rusia memiliki peran yang besar dalam konsep ‘saling mempersatukan diri’ ini. (Zisserman-Brodsky, 2003: 28)

hak penggunaan bahasa daerah, namun persamaan derajat antara bahasa Rusia dengan bahasa lainnya tidak pernah menjadi tujuan politik bahasa di Uni Soviet. Hal ini terlihat dari strategi bahasa pemerintahan Uni Soviet, pertama, pemerintah mempromosikan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua di daerah-daerah, kemudian mempromosikan penggunaan bahasa Rusia berdampingan dengan bahasa daerah (bilingualisme), dan tujuan akhirnya adalah mengganti bahasa-bahasa etnis minoritas dengan bahasa Rusia. (Fane dalam Bremmer dan Taras, 1993: 133). Hal ini membuat etnis Rus menjadi etnis superior diantara etnis-etnis lain di Uni Soviet. Pada akhirnya, status dan keadaan etnis-etnis minoritas di Uni Soviet tidak jauh berbeda seperti pada saat berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Rusia.

2.2.3 Kebangkitan Bahasa-Bahasa Minoritas di Uni Soviet

Pada 11 Maret 1985, Mikhail Gorbachev dipilih oleh Majelis Tinggi Uni Soviet untuk memimpin Uni Soviet. Mikhail Gorbachev adalah seorang tokoh muda yang menginginkan adanya perbaikan di Uni Soviet setelah stagnansi berkepanjangan di berbagai bidang melanda negara tersebut. Pada tahun 1986, secara resmi Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan *Perestroika* (Restrukturisasi)¹² yang didalamnya juga terkandung konsep *Glasnost* (Keterbukaan)¹³ dan *Demokratia* (Demokrasi) (Alkatiri, 2007: 65-67). Kebijakan yang pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi Uni Soviet itu malah membawa negara tersebut menuju kehancuran. Kebijakan Mikhail Gorbachev tersebut ternyata berpengaruh terhadap meningkatnya gerakan separatisme (Fahrurudji, 2005: 184). Munculnya gejala-gejala disintegrasi pada waktu itu juga diikuti dengan kebangkitan bahasa-bahasa minoritas. Pada saat itu tidak jarang bahasa digunakan sebagai alat untuk mempertajam semangat nasionalisme di daerah-daerah.

¹² *Perestroika* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev untuk memperbaiki kondisi perekonomian Uni Soviet yang mengalami stagnansi sejak tahun 70-an (Gorbachev, 1987: 3-4)

¹³ *Glasnost* adalah kebijakan yang turut mengikuti *perestroika*. Mikhail Gorbachev berpikir bahwa dengan adanya *glasnost* maka rakyat Uni Soviet akan belajar mengenai mana yang benar dan mana yang salah, demikian juga mengenai sejarah negara mereka. Melalui kebijakan *glasnost*, Gorbachev ingin agar rakyat memberikan kritik dan saran terhadap program-program pemerintah sehingga *perestroika* (restrukturisasi) yang dicita-citakan akan berhasil. *Glasnost* memberikan jalan bagi perkembangan demokrasi di Uni Soviet (Gorbachev, 1987: 50-51)

Sebelum Turkmenistan memerdekakan diri, para nasionalis di republik tersebut telah terlebih dahulu mempromosikan bahasa Turkmen agar bahasa Turkmen dapat digunakan di segala bidang. Promosi tersebut antara lain dengan cara memperkenalkan bahasa Turkmen sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan yang lebih tinggi, mengembangkan jaringan taman kanak-kanak dengan pengantar bahasa Turkmen, meningkatkan jumlah publikasi jurnal-jurnal ilmiah bahasa Turkmen, meningkatkan pengenalan bahasa Turkmen kepada pegawai negeri yang bukan berasal dari etnis Turkmen. Selain itu, para nasionalis juga membuat gerakan *language purification* (pemurnian bahasa) dan *returkmenisifikasi* nama tempat dan nama orang yang sebelumnya menggunakan bahasa Rusia. Tujuan dari gerakan tersebut jelas adalah untuk memurnikan bahasa Turkmen dari kata-kata pinjaman bahasa Rusia (Nissman dalam Bremmer dan Taras, 1993: 391, 393, 394).

Pada tahun 1988, pemerintah Georgia mengeluarkan draf *State Program for the Georgian Language* (Program Negara untuk Bahasa Georgia). Di dalam draf ini diatur peran bahasa Georgia sebagai bahasa resmi setempat sehingga bahasa Georgia harus digunakan di semua sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Draf tersebut juga menyebutkan ujian bahasa Georgia bagi pelajar yang ingin meneruskan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi (Jones dalam Bremmer dan Taras, 1993: 294).

Pada Agustus 1989, pemerintah Moldavia mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahasa Moldavia sebagai bahasa resmi di Moldavia. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah Moldavia juga mengganti abjad Sirilik, yang tadinya digunakan untuk penulisan bahasa Moldavia, menjadi abjad latin. Pemerintah Moldavia juga mengeluarkan pernyataan bahwa bahasa Moldavia dan bahasa Romania adalah satu. Pernyataan ini merupakan penegasan bahasa Moldavia memiliki hubungan budaya yang sangat dekat dengan Romania karena pada masa pemerintahan Stalin, pemerintah Uni Soviet mencoba untuk memperkenalkan variasi baru bahasa Moldavia dengan tujuan untuk menjauhkan budaya Moldavia dari budaya Romania (Fane dalam Bremmer dan Taras, 1993: 122, 133).

Apa yang dilakukan oleh Moldavia ini juga diikuti oleh republik-republik lain. Pada tahun 1989, Uzbekistan mengeluarkan undang-undang yang

menetapkan bahasa Uzbek sebagai bahasa resmi. Undang-undang tersebut secara tidak langsung menggeser posisi bahasa Rusia dari kedudukan sebelumnya (Bremmer dan Taras, 1993: 345). Hal yang sama juga terjadi di Tajikistan pada tahun 1989. Undang-undang bahasa yang dikeluarkan oleh pemerintah Tajikistan menyatakan bahwa bahasa Tajik berhubungan erat dengan bahasa Persia. Di dalam undang-undang tersebut dan program yang disebut dengan *Rastokhez*, tersirat keinginan untuk mengganti abjad Sirilik dengan abjad Arab bagi penulisan bahasa Tajik. (Atkin dalam Bremmer dan Taras, 1993: 374-375). Hal ini menunjukkan bahwa orang Tajik lebih dekat secara budaya dengan Persia atau Iran daripada dengan Rusia. Estonia juga mengeluarkan undang-undang bahasa yang menetapkan bahasa Estonia sebagai bahasa resmi pada tahun 1989 (Bremmer dan Taras, 1993: 215).

Undang-undang bahasa dan program bahasa yang dijalankan di republik-republik Uni Soviet yang disebutkan di atas sebagian besar digunakan untuk menghilangkan pengaruh bahasa Rusia. Selain itu, juga terlihat bahwa melalui penggunaan bahasa setempat sebagai bahasa resmi, mereka berusaha mencari dan kembali kepada akar budayanya, seperti Moldavia yang berusaha memperkuat kembali ikatan budayanya dengan Romania dan Tajikistan yang berusaha memperkuat hubungannya dengan kebudayaan Persia atau Iran. Bahasa merupakan salah satu inti dari sebuah identitas sosial yang karenanya dapat tumbuh rasa nasionalisme diantara orang-orang yang memiliki bahasa yang sama.

BAB 3

ANALISIS POLITIK BAHASA SEBAGAI STRATEGI INTEGRASI NASIONAL DI FEDERASI RUSIA

Politik bahasa menjadi bagian dari sejarah Rusia, baik pada zaman Kekaisaran maupun zaman Uni Soviet yang ditunjukkan dengan adanya *rusifikasi* bahasa. Politik bahasa pada zaman Kekaisaran dan Uni Soviet memperlihatkan keinginan pemerintah pusat untuk menyeragamkan etnis-etnis yang ada sesuai dengan kebudayaan etnis Rus yang dianggap memiliki kebudayaan paling luhur. Pada bab ini akan dibahas bagaimana penyelenggaraan politik bahasa di negara Federasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet dan pengaruhnya pada integrasi nasional.

3.1 Multilingulisme di Federasi Rusia

Pengakuan pemerintah Federasi Rusia terhadap bahasa-bahasa etnis minoritas di Rusia tercermin dalam Pasal 68 Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993. Pasal 68 berbunyi:

- *‘Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.’*
(Gosudarstvennym jazikom Rossijskoj Federacii na vsej ee territorii javljaetsja russkij jazyk.)

Bahasa resmi Federasi Rusia di semua wilayahnya adalah bahasa Rusia (Ayat 1).

- *‘Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.’*

(Respubliki vprave ustanavlivat' svoi gosudarstvennye jaziki. V organax gosudarstvennoj vlasti, organax mestnogo samoupravlenija, gosudarstvennyx učreždenijax respublik oni upotrebljajutsja narjadu s gosudarstvennym jazikom Rossijskoj Federacii.)

Republik-republik berhak untuk menetapkan bahasa-bahasa resminya sendiri. Di dalam badan-badan otoritas pemerintah dan organ-organ otonomi setempat bahasa-bahasa tersebut digunakan bersamaan dengan bahasa resmi Federasi Rusia (Ayat 2).

- *‘Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.’*

(Rossijskaja Federacija garatiruet vsem ee narodam pravo na soxranenie rodnogo jazika, sozdanie uslovij dlja ego izučenia i razbitija.)

Pemerintah Federasi Rusia menjamin hak seluruh rakyatnya dalam pelestarian bahasa ibu, penciptaan kondisi bagi penelitian dan pengembangannya (Ayat 3).

Sebelum hak-hak penggunaan bahasa ibu atau bahasa etnis minoritas ini tercatat dalam Konstitusi 1993, Federasi Rusia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Tentang Bahasa-Bahasa Rakyat Federasi Rusia pada tahun 1991. Pada bagian pembukaan undang-undang tersebut terdapat pernyataan:

- *‘Языки народов Российской Федерации - национальное достояние Российского государства.’*

(Jazyki narodov Rossijskoj Federavii – nacional’noe dostojanie Rossijskogo gosudarstvo)

Bahasa-bahasa rakyat Federasi Rusia adalah kekayaan nasional negara Rusia (paragraph pertama)

- *‘Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия.’*

(Gosudarstvo na vsej territorii Rossijskoj Federacii sposovstvuet razvitiju nacional’nyx jazykov, dvujazyčija I mnogojazyčija)

Pemerintah di seluruh teritori Federasi Rusia membantu pengembangan bahasa-bahasa nasional, bilingualism, dan multilingualisme. (paragraph kedua).

Meskipun Undang-Undang Tentang Bahasa-Bahasa Rakyat Federasi Rusia disahkan pertama kali ketika Federasi Rusia masih dalam bentuk RSFSR

(Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia) tetapi undang-undang tersebut masih dipakai hingga saat ini dan telah mengalami dua kali amandemen, yaitu pada tahun 1998 dan tahun 2002. Di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa bahasa Rusia dan bahasa etnis lainnya di Federasi Rusia memiliki kedudukan yang sama. Walaupun hanya subjek federasi berbentuk republik yang diperbolehkan memakai bahasa selain bahasa Rusia sebagai bahasa resmi tetapi rakyat di subjek federasi lain (*oblast*, *kray*, dan *oblast otonom*¹¹) diberikan jaminan dan perlindungan oleh pemerintah pusat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa-bahasa etnis minoritas yang mendiami wilayah bersangkutan (lihat Lampiran 1).

Selain itu, setiap republik di Federasi Rusia memiliki undang-undang bahasa yang menetapkan bahasa-bahasa apa saja yang menjadi bahasa resmi serta bagaimana perlindungan, pengembangan, dan pelestarian baik bahasa etnis *titular*¹² maupun bahasa etnis minoritas *non-titular* di republik bersangkutan. Pengakuan hak dan jaminan perlindungan bahasa-bahasa minoritas di Rusia juga tidak bisa dilepaskan dari peran komunitas atau organisasi internasional. Contohnya, Piagam Eropa Untuk Bahasa-Bahasa Regional atau Bahasa-Bahasa Minoritas yang diratifikasi oleh pemerintah Federasi Rusia pada tanggal 10 Mei tahun 2001.

Peratifikasian Piagam Piagam Eropa Untuk Bahasa-Bahasa Regional atau Bahasa-Bahasa Minoritas tersebut secara tidak langsung mempengaruhi sensus penduduk yang dilakukan di Rusia, khususnya untuk sensus bahasa. Pada tahun 1897-1959, pada bagian pertanyaan tentang bahasa responden hanya diperintahkan untuk menyebutkan bahasa ibu tanpa ada pertanyaan pertanyaan lainnya, seperti apakah sang responden dapat berbicara bahasa Rusia atau tidak (Podlesnyh, 2010: 118). Pada sensus penduduk tahun 2002 Pemerintah Rusia menyediakan tiga kolom tambahan bagi bahasa-bahasa yang dikuasai oleh setiap

¹¹ Menurut Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993 terdapat 89 subjek federasi, yang terdiri dari 22 republik, enam *kray*, 47 *oblast* (provinsi), satu *oblast otonom*, dua Kota Federal, sepuluh *okrug otonom*.

¹² Etnis titular adalah etnis yang secara ekonomi, demografik, kultural, dan politis ditetapkan untuk memiliki kekuasaan administratif di daerah yang bersangkutan. Wimmer menyebut etnis titular ini sebagai *core nation*. Contohnya, di Yakutia etnis *titular*-nya adalah etnis Yakut, di Buryatia etnis *titular*-nya adalah etnis Buryat, dan seterusnya. (Kesici, 2011: 40, Bremmer dan Taras, 1993: 13)

warga selain bahasa Rusia. Pada bagian *‘Владение языками’* (Vladienie jazykami) (Penguasaan bahasa) di bawah ini, sang responde diberi dua buah pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu *Владеете ли Вы русским языком?* (Vladeete li Vy russkim jazykom) menanyakan kepada responden apakah ia dapat berbahasa Rusia dan disediakan dua jawaban, yaitu *‘да’* (da) (ya) dan *‘нет’* (net) (tidak). Pertanyaan kedua adalah *‘Какими иными языками Вы владеете?’* (Kakimi inymi jazykami Vy vladeete) menanyakan bahasa-bahasa lain yang dikuasai oleh sang responden. Bahasa-bahasa lain di sini bukanlah bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, atau bahasa Jerman. Bahasa-bahasa lain di sini adalah bahasa ibu sang responden (Podlesnyh, 2010: 120-121).

Gambar 3.1 Fragmen angket sensus penduduk pada tahun 2002 (blok pertanyaan-pertanyaan tentang penguasaan bahasa)

9 ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

9.1 Владеете ли Вы русским языком?

да нет

9.2 Какими иными языками Вы владеете?

Sumber: *Возможности использования переписных данных в целях имплементации европейской региональных языков и языков меньшинств в России*, O. N. Podlesnyh (2010: 121)

Ada satu hal unik lainnya yang jika kita kaji secara mendalam berkaitan dengan politik bahasa di Federasi Rusia. Pada musim 2012 kontes menyanyi Eurovison, yaitu kontes menyanyi yang diikuti oleh peserta dari negara-negara Eropa, Buranovskie Babushki, sebuah grup vokal yang beranggotakan enam orang nenek, menjadi wakil Rusia. Fenomena yang dikaji di sini bukanlah mengenai anggota Buranovskie Babushki yang rata-rata usianya sudah mencapai 45 tahun ke atas, namun bahasa dalam lagu yang mereka bawaan. Keenam orang

nenek ini menyanyikan lagu dalam bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Udmurt. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kancah internasional, pemerintah Federasi Rusia membebaskan rakyatnya untuk menggunakan bahasa ibu atau bahasa etnis mereka. Salah satu lagu berbahasa Udmurt yang populer dibawakan oleh Buranovskie Babushki adalah *Party for Everybody*. Hal ini menjadi pertanda bahwa politik bahasa di Federasi Rusia kini tidak lagi seperti pada masa Uni Soviet atau Kekaisaran dimana warganya dituntut untuk selalu menggunakan bahasa Rusia.

Gambar 3.2 Penampilan Buranovskie Babushki Pada Kontes Menyanyi Eurovision tahun 2012



Sumber: http://www.eurovisionary.com/files/images/Buranovskie_Babushki.preview.jpg

3.2 Politik Bahasa di Beberapa Republik di Federasi Rusia

Pada masa Kekaisaran dan Uni Soviet, daerah-daerah non-Rus di Federasi Rusia juga mengalami *rusifikasi* bahasa. Bahasa dan budaya Rusia menjadi dominan di daerah-daerah seperti Volga Tengah, Siberia, dan Kaukasus (Bremmer dan Taras, 1993: 439, 451, 483). Di dalam sub bab ini akan dijabarkan bagaimana penerapan politik bahasa di beberapa republik di Federasi Rusia sehingga dapat diketahui apakah politik bahasa yang dilakukan oleh pemerintah Federasi Rusia saat ini sama atau tidak dengan politik bahasa pada masa

Kekaisaran dan Uni Soviet. Data-data yang diperoleh pada sub bab-sub bab berikut ini diperoleh dari laporan Komisi Federasi Rusia untuk UNESCO tahun 2008 tentang pelestarian keragaman bahasa.

3.2.1 Politik Bahasa di Republik Yakutia (Sakha)

Yakutia adalah republik terluas di Rusia dengan total wilayah sebesar 3.103.200 km². Wilayah Yakutia terbentang dalam tiga zona waktu. Pada tahun 2005 tercatat Yakutia memiliki penduduk sebanyak 950.000 orang dan menjadikan daerah ini sebagai daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Rusia.

Menurut sensus tahun 2002, di daerah Yakutia hidup 127 kelompok etnis dengan mayoritas berasal dari etnis Yakut persentase sebesar 45,6% (meningkat 12,1% dari sensus tahun 1989) dan etnis Rus sebesar 41,1%. Populasi kelompok-kelompok penduduk asli minoritas di daerah utara berjumlah sekitar 33.000 orang dengan komposisi etnis Evenk berjumlah 18.232 orang, etnis Even berjumlah 11.657 orang, etnis Yukagir berjumlah 1.097, etnis Dolgan berjumlah 1.272 orang, dan etnis Chukchi berjumlah 602 orang. Selain itu, masih tercatat beberapa kelompok nomaden yang jumlahnya mencapai 238 kelompok.

Bahasa Rusia digunakan oleh 93,3% penduduk di Yakutia. Sebesar 87,4% etnis Yakut, 37,7% etnis Chukchi, 20,7% etnis Even, 19,5% etnis Yukagir, dan 6,5% etnis Evenk mengakui bahasa etnis mereka sebagai bahasa ibu. Penelitian pada tahun 2008 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Yakutia yang berbicara dalam bahasa etnis mereka mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini adalah naiknya kedudukan bahasa Rusia sebagai bahasa antar etnis, pembawa informasi internasional, dan bahasa yang digunakan di perguruan tinggi. Padahal dua tahun sebelum pemerintah Republik Yakutia mengesahkan Undang-Undang Bahasa-Bahasa di Republik Yakutia pada 16 Oktober 1992, bahasa Yakut telah dideklarasikan sebagai bahasa resmi bersama dengan bahasa Rusia, dan memiliki kedudukan serta fungsi yang sama dengan bahasa Rusia.

Banyak penelitian menyimpulkan bahwa turunnya angka penutur bahasa-bahasa etnis di Yakutia adalah karena rendahnya motivasi untuk belajar bahasa-bahasa tersebut. Urbanisasi juga turut meningkatkan keengganan untuk berbicara

dan belajar bahasa maupun budaya asli etnis-etnis di Yakutia. Keadaan ini bertambah buruk karena pelajaran bahasa tidak dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan.

Oleh karena itu antara tahun 2002-2006 pemerintah Yakutia bekerja sama dengan Perpustakaan Yakutia, Badan Arsip Republik Yakutia, dan Museum Sejarah dan Budaya Penduduk Minoritas daerah Utara, membuat sebuah program bernama “Memori Yakutia”. Program ini bertujuan untuk melestarikan dan mempopulerkan dokumen warisan budaya rakyat Yakutia. Program ini dimulai dengan mengalihmediakan buku-buku berbahasa Yakut yang jarang ditemukan, arsip-arsip, gramofon pemain sandiwara Yakut, ke dalam media digital lalu dimasukkan ke dalam jaringan internet sehingga semua orang dapat mengaksesnya.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah Yakutia adalah pelestarian kebudayaan penduduk asli minoritas yang tinggal di daerah Utara. Penduduk asli minoritas ini hidup di daerah yang memiliki iklim tidak ramah dan hal ini menciptakan cara hidup, sejarah, tradisi, dan kebudayaan yang unik, menarik serta mengandung banyak pelajaran. Jika penduduk asli minoritas ini tidak dilindungi maka arus globalisasi dan budaya massa tidak hanya mengancam bahasa mereka tapi juga kebudayaan tradisional mereka. Contoh program pemerintah Yakutia untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan penduduk minoritas ini adalah pengoleksian cerita rakyat, pengetahuan, dan karya-karya penulis dari etnis Even dan Evenk, dalam bentuk audio. Sebuah program juga direncanakan untuk memproduksi *disk* dalam bahasa Even, Yukagir, Evenk, dan Dolgan, yang tidak hanya berisi bibliografi dari karya-karya sastra kelompok-kelompok etnis tersebut tapi juga basis data berupa *full-text* asli.

Penerbitan buku-buku dalam bahasa Yakut mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kitab Injil telah diterjemahkan dalam bahasa Yakut. Kini kitab Injil berbahasa Yakut itu telah dipakai di gereja-gereja.

Perpustakaan Daerah Yakutia memiliki 2 juta koleksi yang 48,000 bukunya dicetak dalam bahasa Yakut dan 1,688 dicetak dalam bahasa penduduk minoritas Utara. Koleksi-koleksi ini mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 1990-1994, peningkatan koleksi buku-buku berbahasa Yakut sebesar 16,1% dan 32,4% bagi buku-buku yang dicetak dalam bahasa penduduk minoritas Utara.

Pada tahun 1995-1999 terdapat peningkatan 9,3% koleksi buku-buku berbahasa Yakut dan 9,5% koleksi buku-buku dalam bahasa penduduk minoritas Utara. Pada tahun 2000-2004, koleksi buku-buku berbahasa Yakut meningkat sebesar 14,8% dan koleksi buku-buku dalam bahasa penduduk minoritas utara meningkat sebesar 14,4%.

Penetapan bahasa Yakut dan bahasa Rusia menjadi bahasa resmi daerah Yakutia tidak saja memberikan kepercayaan diri terhadap etnis Yakut sebagai etnis yang juga setara dengan etnis mayoritas, yaitu etnis Rus, tapi juga memberikan mereka jalan untuk kembali kepada identitas awal mereka, yaitu akar budaya mereka. Pelestarian bahasa Yakut mau tidak mau juga turut melestarikan budaya mereka. Seperti yang dikatakan oleh Abdilah S. Ubed, setiap etnis selalu ingin tampil dalam corak kebudayaannya untuk bertahan di dunia ini dan tidak melebur dengan kebudayaan lainnya karena hanya dengan cara itulah mereka dapat eksis di dunia ini dan dapat terus memiliki identitas “Yakut”. Politik bahasa, seperti yang diterangkan pada sub bab landasan teori, salah tujuannya adalah untuk melestarikan bahasa yang telah ada. Pelestarian bahasa sebagai sebuah tujuan politik bahasa, juga ditujukan kepada etnis-etnis minoritas lainnya, seperti etnis Even dan Evenk karena diharapkan dengan pelestarian bahasa mereka, kebudayaan mereka juga akan terus hidup.

3.2.2 Politik Bahasa di Republik Karelia

Karelia adalah sebuah daerah dengan jumlah penduduk sebesar 690.600 orang. Menurut sensus penduduk tahun 2002, terdapat lebih dari 150 etnis tinggal di wilayah Karelia. Komposisi penduduk Karelia terdiri dari etnis Rus (76,6%), etnis Belarusia (5,3%), etnis Ukraina (2,7%), Etnis Karelia yang (9,2%) etnis Fin (2,05%), serta etnis Vepsia (0,7%). Tiga etnis yang disebutkan terakhir merupakan etnis asli daerah Karelia. Oleh karena komposisi penduduk yang sangat plural maka pemerintah Karelia memberikan otonomi budaya kepada warganya yang diimplementasikan melalui pendirian 40 organisasi budaya. Dengan begitu kehidupan komunitas dan politik di Karelia akan tetap stabil.

Sejarah kebangkitan kembali dan perkembangan bahasa dan budaya etnis-etnis di Karelia dimulai pada akhir tahun 1980-an ketika politik bahasa terhadap

etnis-etnis minoritas lebih terbuka. Bahasa Karelia dan Vepsia pada waktu itu masuk ke dalam kurikulum beberapa institusi pendidikan, abjad Karelia dan Vepsia dibuat dan dimulailah perkembangan kedua bahasa tersebut menjadi bahasa tulis (*literate language*). Buku pelajaran dan koran mulai dicetak dalam bahasa Karelia dan Vepsia. Kemudian muncul siaran televisi dan cerita fiksi dalam bahasa-bahasa etnis minoritas, diikuti dengan berdirinya berbagai organisasi kebudayaan Karelia, Vepsia, dan Inggri-Fin.

Karelia telah mengesahkan setidaknya 30 peraturan maupun undang-undang yang bertujuan untuk mempromosikan bahasa dan budaya Karelia, Vepsia, dan Fin melalui pendidikan, serta memulihkan fungsi bahasa-bahasa tersebut di masyarakat. Undang-Undang Dukungan Pemerintah Terhadap Bahasa Karelia, Bahasa Vepsia, dan Bahasa Fin disahkan pada tahun 2004. Dalam Pembukaan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bahasa Karelia, Vepsia, dan Fin adalah warisan budaya Republik Karelia dan bersama dengan bahasa etnis-etnis lain akan mendapat perlindungan dari pemerintah.

Pemerintah Karelia telah membuat program-program yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa-bahasa etnis, antara lain dengan menetapkan pelajaran bahasa dan budaya di institusi-institusi pendidikan, memajukan pelayanan pendidikan budaya kelompok-kelompok etnis dan budaya tradisional secara kuantitatif dan kualitatif, melestarikan dan memajukan media-media berbahasa Karelia, Vepsia, dan Fin yang telah ada, melatih ahli-ahli bahasa, dan memonitor penelitian, pembelajaran, dan penggunaan bahasa etnis.

Untuk menjamin stabilitas kehidupan Karelia, pemerintah setempat juga mempromosikan toleransi antar kelompok etnis untuk menghindari terbentuknya kelompok-kelompok ekstrimis dan konflik antar etnis maupun antar agama. Hal ini dibuktikan dengan program Harmonisasi Hubungan Antar Etnis dan Antar Kepercayaan dan Pengembangan Keserasian Masyarakat untuk tahun 2007-2011 dengan moto “Karelia: Daerah untuk Keserasian”. Program tersebut turut memfasilitasi inisiatif organisasi-organisasi sosial untuk mempromosikan dialog budaya dan keselarasan masyarakat.

Politik bahasa yang dilakukan telah membuat warga di Karelia telah menyadari pentingnya bahasa-bahasa etnis. Penulis-penulis, musisi, aktor dan

aktris Karelia menjadi lebih aktif untuk mempromosikan budaya Karelia daripada sebelumnya. Karya-karya mereka mengundang apresiasi warga, baik dari dalam maupun luar Republik Karelia. Teater Pemerintah Republik Karelia, contohnya, turut mempromosikan bahasa serta budaya Fin dan Karelia. Para pemuda di Karelia juga menunjukkan ketertarikannya terhadap bahasa dan budaya Karelia dan Vepsia lebih dari sebelumnya.

Penelitian pun dilakukan di berbagai bidang, seperti arkeologi, linguistik, etnologi, folklor, sejarah dan toponimi¹³ Karelia. Pemerintah Karelia memberikan perhatian yang besar dalam pemeliharaan bahasa daerah dengan membentuk kurikulum yang berisi pembelajaran etnis budaya, memperbaiki dasar materi dan teknis dari kurikulum tersebut, dan melatih pengajar-pengajar agar menjadi pengajar yang berkualitas. Tidak hanya itu, pemerintah Karelia juga menjajikan jabatan di bidang pendidikan, institusi budaya dan penelitian, serta media masa bagi ahli bahasa dan budaya Karelia maupun Vepsia. Perhatian pemerintah setempat yang besar terhadap pelestarian bahasa dan budaya setempat adalah kunci sukses dari politik bahasa di Karelia.

Perpustakaan Pemerintah Republik Karelia adalah salah satu institusi yang memiliki proyek untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Karelia dan Vepsia. Koleksinya terdinya dari lebih dari satu juta buku dengan berbagai bahasa, lebih dari 500.000 majalah, lembar musik, koleksi audio-visual dan elektronik, peta dan mikrofilm, termasuk 40.000 dokumen tentang sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan komunitas etnis Karelia, baik yang ditulis dalam bahasa Karelia, Rusia, Vepsia, Fin, dan bahasa-bahasa lainnya. Perpustakaan menawarkan pelayanan bibliografi dan referensi yang luas dengan katalog dan berkas-berkas, dan sebuah koleksi referensi kesusastraan. Semua koleksi perpustakaan ini ditunjukkan dengan katalog pengguna yang disusun secara alfabet dan tematis dan katalog yang disusun secara alfabet umum untuk pegawai. Penyusunan katalog elektronik dimulai dari tahun 1993. Saat ini katalog tersebut terdiri dari 700.000 dokumen. Perpustakaan ini memiliki pusat katalog dalam bahasa Karelia dan Vepsia.

¹³ Topo nimi adalah cabang onomastika yg menyelidiki nama tempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>) diakses pada 17 Juni 2012 pukul 23.03).

Pada tahun 2006, pemerintah Karelia meluncurkan program Perpustakaan Elektronik untuk perpustakaan-perpustakaan yang secara tradisional dihuni oleh etnis Karelia dan Vepsia. Tiga disk dengan buku versi elektronik keluar pada tahun 2006-2007. Terdapat 154 judul dalam bahasa Karelia, Vepsia, Fin, dan Rusia diproduksi antara tahun 1992-2007.

Penerbit Periodika menerbitkan enam koran, salah satunya adalah *Oma mua* yang diterbitkan dalam dilek Livvik dan *Vienan Karjala* yang diterbitkan dalam bahasa Karelia, dan majalah kesusastraan dan seni *Carelia* yang didalamnya juga terdapat tulisan dalam bahasa Karelia, serta majalah anak-anak *Kipin*. Majalah-majalah ini diterbitkan di Karelia, wilayah Rusia lainnya, dan Finlandia. Majalah *Vienan Karjala* beroplak sebesar 500 eksemplar, sedangkan *Carelia* sebesar 860 eksemplar. Pada kongres internasional penulis-penulis Finno-Ugrian ke-9 menunjukkan bahwa perkembangan kesusastraan etnis di Karelia cukup baik. Jumlah penulis profesional melejit dan sebagian besar dari mereka menulis dalam bahasa Karelia.

Politik bahasa yang dilakukan oleh pemerintah Karelia lebih terbuka. Dapat dikatakan demikian karena setidaknya melalui politik bahasa tersebut ada setidaknya tiga bahasa yang menjadi fokus utama, yaitu bahasa Karelia, bahasa Vepsia, dan bahasa Fin, sesuai dengan perbandingan jumlah populasi etnis yang ada di daerah Karelia. Seperti halnya di Yakutia, kebangkitan bahasa Karelia, Vepsia, dan Fin juga membukakan jalan bagi etnis-etnis tersebut untuk kembali lagi kepada akar budaya mereka. Bahkan, politik bahasa di daerah tersebut mendorong penelitian-penelitian ilmiah terhadap kebudayaan Karelia dan Vepsia, tidak hanya di dalam bidang linguistik, namun juga etnologi, arkeologi, foleklor dan sebagainya. Keikutsertaan warga Karelia dalam melestarikan bahasa ibunya masing-masing menjadi bukti bahwa mereka bangga atau setidaknya tetap kan memakai etnisitas mereka sebagai sebuah identitas.

3.2.3 Politik Bahasa di Republik Buryatia

Menurut sensus tahun 2002, Buryatia dihuni oleh 981.238 penduduk. Di republik ini terdapat lebih dari 100 kelompok etnis. Etnis Rus menyumbang 67,82% dari seluruh jumlah penduduk, etnis Buryat 27,81%, etnis Ukraina 0,98%,

dan etnis-etnis lain sebesar 3,39%. Bahasa Rusia dan bahasa Buryat menjadi bahasa resmi menurut Konstitusi Republik Buryatia dan Undang-Undang Bahasa-Bahasa Rakyat Buryatia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua bahasa di Buryatia memiliki posisi yang setara dan persamaan hak bagi warga untuk menggunakan bahasa apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan federal. Meskipun undang-undang bahasa telah ditetapkan namun belum ada mekanisme yang jelas tentang pelaksanaan politik bahasa baik terhadap bahasa Buryat, bahasa Rusia, maupun bahasa etnis minoritas lainnya.

Dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Buryat, pemerintah Buryatia mengimplementasikannya dalam beberapa proyek. Pada tahun 2006, Panduan Elektronik Bahasa Buryat (*Electronic Manual of the Buryat Language*) diterbitkan. Panduan tersebut tidak hanya memuat diktat-diktat, latihan-latihan, dan teks-teks, tapi di dalamnya juga terdapat 14 kamus elektronik dan material tentang sejarah, seni, geografi, adat, kepercayaan etnis Buryat. Di dalam Panduan ini terdapat total 500 artikel dan lebih dari 1000 foto. Panduan ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar tapi juga orang dewasa yang berbicara dalam bahasa etnis mereka. Panduan Elektronik ini dibuat oleh tim gabungan dari berbagai bidang, seperti filolog, jurnalis, sarjana agama, bisnismen, fotografer, desiner, dan programmer.

Pemerintah Buryatia juga membuat CD dan DVD mengenai warisan budaya Buryat dengan tema “Buryatia: Sebuah Daerah Budaya”. Perpustakaan Republik Buryatia juga sedang menyusun koleksi digital mengenai sejarah terbentuknya dan perkembangan Buddhisme di Buryatia. Contoh DVD yang telah dipublikasikan dengan judul “Datsans: Dulu dan Sekarang” dan “Geser: Sebuah Epik Heroik Buryat”. DVD ini tidak hanya dibuat dalam bahasa Rusia tapi juga dalam bahasa Buryat, bahkan dalam bahasa Evenk dan Mongol.

Bahasa Buryat pada beberapa tahun belakang ini menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan ini juga diikuti oleh perkembangan agama minoritas di sana, yaitu agama Buddha. Tidak seperti penduduk Rusia kebanyakan yang memeluk agama Kristen Ortodoks, etnis Buryat tetap teguh memegang kepercayaan nenek moyangnya. Dari sini terlihat bahwa pelestarian

bahasa juga ternyata berdampak pada penghormatan terhadap sebuah agama, walaupun pemeluknya adalah etnis minoritas.

3.2.4 Politik Bahasa di Republik Tatarstan

Dalam sensus yang dilakukan pada tahun 2002 tercatat bahwa 3,7 juta penduduk tinggal di Tatarstan. Sebesar 52,9% penduduk Tatarstan berasal dari etnis Tatar dan 39,5% lainnya berasal dari etnis Rus. Bahasa Tatar dan bahasa Rusia adalah dua bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi di Tatarstan.

Politik bahasa di Tatarstan dapat dilihat melalui Program Pemerintah Republik Tatarstan untuk Pelestarian, Studi, dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Tatarstan yang dikeluarkan pada tahun 1994 dan draf konsep politik bahasa pada tahun 1999. Kedua dokumen tersebut menjadi pondasi bagi implementasi mekanisme politik bahasa di Tatarstan yang bertujuan untuk menaikkan fungsi sosial bahasa Tatar agar penggunaannya setara dengan bahasa Rusia. Pada tahun 2004, pemerintah Tatarstan menargetkan penggunaan bahasa Tatar di bidang humaniora melalui teknologi informasi dan pembentukan basis data (*database*) bagi pembelajaran bahasa Tatar. Selain bahasa Tatar dan bahasa Rusia, program Pelestarian, Studi, dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Tatarstan juga fokus terhadap pengembangan bahasa-bahasa etnis lain dan toleransi antar bahasa.

Di Tatarstan terdapat 2.261 sekolah dengan 1.147 diantaranya memiliki pelajaran yang disampaikan melalui bahasa Tatar, 380 sekolah memiliki kelas-kelas bilingual dengan pelajaran dalam bahasa Tatar maupun bahasa Rusia. Selain itu, di Tatarstan juga terdapat 199 sekolah dengan pengantar bahasa Chuvash, 44 sekolah dengan pengantar bahasa Udmurt, 20 sekolah dengan pengantar bahasa Mari, empat sekolah dengan bahasa Mordovia, dan satu sekolah dengan pengantar bahasa Bashkir. Bahkan di sebuah sekolah diajarkan bahasa Ibrani serta sejarah dan budaya Yahudi modern, juga terdapat sebuah taman kanak-kanak yang menggunakan bahasa Ibrani modern. Pada tahun 2008, semua anak sekolah di Tatarstan mempelajari bahasa Rusia dan 99,8% mempelajari bahasa Tatar. Sebanyak 53% anak-anak etnis Tatar belajar dalam bahasa Tatar.

Taman kanak-kanak yang menggunakan pengantar bahasa Tatar meningkat jumlahnya dari 692 pada tahun 1998 menjadi 867 pada tahun 2008.

Sebanyak 532 taman kanak-kanak menggunakan bahasa Rusia dan bahasa Tatar sebagai bahasa pengantar. Terdapat juga 51 taman kanak-kanak yang menggunakan bahasa pengantar dalam bahasa Chuvash, 14 dalam bahasa Udmurt, dan 10 dalam bahasa Mari

Pemerintah Tatarstan memberikan insentif sebesar 15% dari gaji untuk pegawai-pegawai yang dapat berbicara dalam bahasa Tatar dan bahasa Rusia. Setiap tahun pemerintah Tatarstan juga memberikan anugrah bagi guru teladan, termasuk diantaranya kategori untuk guru bahasa Tatar dan guru bahasa Rusia terbaik. Bahasa Tatar dan bahasa Rusia menjadi mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan umum sesuai dengan Artikel 9 Undang-Undang Bahasa-Bahasa Resmi Republik Tatarstan dan Bahasa-Bahasa Lain di Republik Tatarstan. Pada tahun 2008, tercatat 99,8% anak-anak sekolah di Tatarstan mempelajari bahasa Tatar dan 53% anak-anak etnis Tatar belajar dalam bahasa ibu mereka.

Sebanyak 88% orang tua dari etnis Tatar dan 44% orang tua dari etnis Rusia menyetujui adanya pelajaran bahasa Tatar di sekolah-sekolah dengan pengantar bahasa Rusia. Sebanyak 82% responden menyatakan bahwa bahasa Tatar dan bahasa Rusia perlu digunakan di organ-organ pemerintah dan 79% menyatakan bahwa kedua bahasa ini seharusnya digunakan untuk pelayanan konsumen.

Jumlah penduduk dari etnis Rusia yang mengerti bahasa Tatar meningkat dari 1,1% pada tahun 1989 menjadi 4,3% pada tahun 2002. Sebesar 76% etnis Tatar dapat berbicara dalam bahasa Tatar dengan lancar, 16% mengaku dapat berbicara dalam bahasa Tatar walaupun tidak terlalu lancar. Meskipun begitu, orang-orang Tatar jarang menggunakan bahasa ibu mereka di luar rumah.

Pada tahun 1989 terdapat 7 institusi pendidikan vokasi yang memiliki mata kuliah dalam bahasa Tatar, sedangkan pada tahun 2008 jumlahnya mengalami kenaikan sebanyak 10 institusi. Setiap peserta ujian masuk perguruan tinggi dapat memilih soal ujian dalam bahasa Tatar maupun dalam bahasa Rusia. Pada tahun 2005 Universitas Humaniora-Pedagogi Negeri Tatarstan didirikan dan bahasa Tatar banyak digunakan di mata perkuliahan.

Terdapat lebih dari 24,8 juta buku yang terdapat di perpustakaan-perpustakaan di Tatarstan, lebih dari 4,7 juta diantaranya dicetak dalam bahasa-

bahasa etnis (selain bahasa Rusia). Koleksi buku sastra rakyat Volga mencapai 153.700 dokumen. Terdapat 10,9 buku per kapita untuk etnik Rus, 2,2 untuk etnis Tatar, 0,9 untuk etnis Chuvash, 0,42 untuk etnis Mari, 0,77 untuk etnis Udmurt, 0,06 untuk etnis Mordovia, dan 0,03 untuk etnis Bashkir. Kementerian Kebudayaan Tatarstan memiliki alokasi yang teratur untuk membiayai kesusastraan rakyat daerah Volga. Perpustakaan Daerah, yang merupakan perpustakaan terbesar di Tatarstan, memiliki 3 juta koleksi yang 96,000 diantaranya berbahasa Tatar. Proyek untuk mendirikan Perpustakaan Elektronik dalam bahasa Tatar dimulai pada tahun 2007 yang di dalamnya memasukan 100 buku klasik berbahasa Tatar.

Dari 825 media cetak yang ada di Tatarstan, 110 koran (52 diantaranya adalah milik pemerintah) dan 28 majalah (10 diantaranya milik pemerintah) dicetak dalam bahasa Tatar. Terdapat pula lima koran dalam bahasa Chuvash, satu dalam bahasa Udmurt dan beberapa majalah bilingual yang diterbitkan dalam bahasa Tatar dan Rusia.

Politik bahasa yang dilaksanakan di Tatarstan membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan bahasa di daerah tersebut. Pengembangan dan pelestarian bahasa melalui pendidikan maupun dengan memanfaatkan teknologi terus dilakukan. Usaha-usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai 'kesetaraan' antara bahasa Tatar dan bahasa Rusia. Hal ini dapat diartikan bahwa etnis Tatar juga ingin hak-haknya dan identitasnya diakui setara dengan etnis Rus.

3.2.5 Politik Bahasa di Republik Chuvashia

Chuvashia ada sebuah daerah yang terletak di Volga-Vyatka. Politik bahasa yang ada di daerah ini menunjukkan perkembangan yang positif terhadap pelestarian bahasa dan penekanan konflik antar etnis, setidaknya hal ini menurut Natalia Volodina di dalam laporan yang ditulisnya kepada UNESCO. Terdapat 97 kelompok etnis yang tinggal di daerah ini dengan mayoritas penduduk ditempati oleh etnis Chuvash, yaitu sebesar 67,7%. Tempat kedua ditempati oleh etnis Rus sebesar 26,5%, lalu etnis Tatar 2,8%, etnis Mordavia 1,2%, dan etnis-etnis lainnya 1,8%.

Chuvashia mengesahkan Undang-Undang Bahasa pada tahun 1993 dan menetapkan bahasa Chuvash serta bahasa Rusia sebagai bahasa resmi di daerah tersebut. Bahasa Chuvash banyak meminjam kosakata dari bahasa-bahasa Turki (Tyurk), Arab, Persia, Mongol, Georgia, Armenia, Yidi, Ibrani, Rusia, dan Finno-Ugrian. Orang pertama yang dianggap berjasa bagi perkembangan dan pelestarian bahasa Chuvash adalah Ivan Yakolev. Menurut Ivan Yakolev, pendidikan yang membatasi penggunaan bahasa daerah adalah pendidikan yang aneh dan musuh bagi manusia. Kini, semua pembelajaran di sekolah-sekolah di Chuvashia menggunakan bahasa Chuvash sebagai bahasa resmi. Terdapat 1.040 pengajar bahasa Chuvash yang 98% diantaranya memiliki gelar sarjana dan 80% diantaranya telah tersertifikasi. Di Chuvashia juga terdapat kelas khusus bagi para pelajar yang ingin memperdalam pengetahuannya atau tertarik dengan filologi, budaya, dan sejarah Chuvash.

Multikulturalisme dan multilingualisme sangat terasa di Chuvashia. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya 22 asosiasi budaya dari 12 etnis yang ada pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 1994 hanya ada tujuh asosiasi. Terdapat 344 sekolah di Chuvashia dengan pengantar bahasa Chuvash, 177 sekolah dengan pengantar bahasa Rusia, 17 sekolah dengan pengantar bahasa Tatar, dan 4 sekolah dengan pengantar bahasa Mordovia. Di perpustakaan-perpustakaan yang ada di Chuvashia juga terdapat pusat-pusat kebudayaan, tidak hanya pusat kebudayaan Chuvash, tapi juga pusat kebudayaan kelompok etnis lain, seperti pusat kebudayaan Tatar, Rus, dan Mordovia. Untuk mempromosikan bahasa dan budaya Chuvash serta mempromosikan toleransi antara kelompok etnis, pemerintah setempat mengadakan beberapa acara kebudayaan, seperti festival musik Chuvash, festival rakyat Rus, festival musik Tatar, perlombaan Chuvash Piki, festival Tanah Pangeran Burtas, dan lain lain. Pemerintah Chuvashia mengerti betul bahwa bahasa merupakan mata rantai yang menghubungkan mereka dengan warisan budaya dan sejarah nenek moyang mereka.

Penerbitan buku-buku berbahasa Chuvash mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2000-an telah diterbitkan 60 buku pelajaran bahasa Chuvash dan bahasa Rusia. Pemerintah Chuvashia telah menerbitkan Ensiklopedia Chuvash yang akan dicetak dalam beberapa volume. Perpustakaan-perpustakaan juga secara telah memperbanyak koleksinya dengan buku-buku fiksi

anak-anak berbahasa Cuvash. Sebanyak 10,768 kopi buku tersebut telah disebar di perpustakaan-perpustakaan sekolah dan 21.742 kopi disebar pada tahun berikutnya. Pada tahun 2008 dimulai proyek penerjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Chuvash dan diterbitkan pada tahun 2009. Hampir 80% koran yang diterbitkan di Chuvashia dicetak dalam bahasa Chuvash

Proyek “Memori Chuvashia” dikerjakan untuk menyediakan akses bagi siapa saja yang ingin mengetahui dokumentasi kebudayaan rakyat Chuvashia. Koleksi-koleksi Museum Seni Chuvash juga dialihmediakan dalam bentuk digital. Selain itu, terdapat juga proyek Perpustakaan Elektronik yang di dalamnya berisi katalog buku-buku berbahasa Chuvash. Katalog sejarah setempat diterjemahkan dalam bahasa Rusia dan Chuvash. Ringkasan tentang bahasa Chuvash dalam media elektronik juga dibuat.

Seperti halnya daerah-daerah lain, politik bahasa di Chuvashia juga berpengaruh terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa Chuvash sebagai bahasa resmi di daerah tersebut, di samping bahasa Rusia. Politik bahasa pun bermuara terhadap pelestarian dan pengembangan budaya Chuvash. Namun, yang ditekankan di dalam laporan Natalia Volodina adalah kemampuan pemerintah Chuvashia untuk menjaga kehidupan yang serasi antar kelompok etnis di Chuvashia melalui festival-festival atau program-program kebudayaan di daerah tersebut karena dengan demikian pemerintah Chuvashia berharap integrasi antar etnis akan terjalin.

3.2.6 Politik Bahasa di Republik Dagestan

Dagestan merupakan sebuah daerah yang unik karena republik ini tidak memiliki etnis titular. Menurut laporan Komisi Federasi Rusia kepada UNESCO yang ditulis oleh Elmir Yakubov, di Dagestan terdapat empat belas etnis mayoritas dimana setiap etnis memiliki bahasa masing-masing dengan berbagai dialek dan sub bahasa yang bahkan membentuk 60 bahasa verbal. Oleh karena itu, permasalahan etnis dan bahasa di daerah ini cukup kompleks. Menurut Konstitusi Republik Dagestan, bahasa Rusia dan bahasa-bahasa daerah ditetapkan sebagai bahasa resmi.

Banyaknya etnis dan bahasa di Dagestan menjadi masalah tersendiri bagi pemeliharaan bahasa-bahasa etnis di republik tersebut. Walaupun menurut undang-undang setempat bahasa-bahasa etnis ditetapkan sebagai bahasa resmi, namun penduduk Dagestan lebih banyak menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Rusia tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar etnis tapi juga untuk menunjang karir mereka. Kegiatan politik, akademik, dan kehidupan komunitas di Dagestan juga lebih banyak menggunakan bahasa Rusia. Banyak penduduk Dagestan yang sekarang tidak peduli lagi dengan latar belakang dan bahasa asli etnis mereka.

Hal-hal tersebut menjadi masalah yang harus dipikirkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, pada tahun 2008, pemerintah Dagestan membuat sebuah program yang ditunjukan bagi pengembangan hubungan antar etnis di Dagestan untuk tahun 2008-2010. Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan dapat membuat hubungan antar etnis yang lebih harmonis dan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi masalah-masalah yang dapat menimbulkan konflik etnis. Untuk mengimplementasikannya, pemerintah Dagestan telah membuat tiga program, yaitu membentuk komisi permanen untuk orthografi dan terminologi, membentuk perlombaan untuk anak-anak sekolah tentang bahasa-bahasa etnis di Dagesta, adat-istiadat, dan tradisi, ketiga adalah program pelestarian dan pengembangan bahasa-bahasa etnis.

Beberapa institusi yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa-bahasa etnis juga didirikan, seperti *Gamzat Tsadasa Institute of Language, Literature, and Art* (Institut Bahasa, Sastra, dan Seni Gamzat Tsadasa). Pada tahun 2003-2008, Pusat Penelitian Bahasa-Bahasa Dagestan Akademi Sains Rusia membuat kamus Rusia-Dagestan (bahasa tertulis (*literate language*)) yang di dalamnya terdapat tiga puluh sampai empat puluh ribu kosakata. Para peneliti bahasa-bahasa Dagestan juga telah membuat sepuluh kamus bahasa-bahasa tak tertulis (*non-literate languages*) dengan bantuan Institut Maz Planck, Jerman, dan Universitas Leiden, Belanda. Pada tahun 2007, Universitas Negeri Dagestan mengadakan konferensi ilmiah internasional “Bahasa-Bahasa Dunia dan Masalah Toleransi dalam Interaksi Linguo-Kultural pada Masyarakat Multi Etnis” (*Languages of the World and the Problem of*

Tolerance in Linguo-cultural Interaction in the Multiethnic Space) yang mendiskusikan tentang politik bahasa, kontak antar bahasa, bilingualisme dan multilingualisme, dan peran bahasa Rusia sebagai media komunikasi antar etnis di Dagestan. Pada tahun 2006-2007, dimulai penelitian tentang penyebab-penyebab musnahnya beberapa bahasa-bahasa tak tertulis (*illiterate*) dan menganalisa solusi yang efektif untuk mencegah hal terjadi pada bahasa-bahasa minoritas lainnya. Para peneliti berpendapat bahwa pelestarian multilingualisme yang ada di Dagestan adalah faktor budaya yang penting bagi integrasi etnis-etnis di Dagestan.

Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Republik Dagestan, telah ditetapkan bahwa bahasa Rusia dan bahasa-bahasa etnis dapat menjadi bahasa pengantar di institusi-institusi pendidikan, sedangkan insitusi-institusi pendidikan yang memakai bahasa Rusia sebagai pengantar wajib membentuk mata pelajaran bagi bahasa-bahasa etnis. Untuk meningkatkan ketertarikan pelajar-pelajar terhadap bahasa etnis mereka, pemerintah Dagestan mengadakan perlombaan tahunan dimana pemenangnya akan diterima sebagai mahasiswa Departemen Filologi Bahasa-Bahasa Dagestan di Universitas Negeri Dagestan tanpa harus mengikuti tes masuk. Sampai pada tahun 2008 telah ada sebanyak 250 pengajar bahasa-bahasa etnis minoritas yang lulus dari berbagai institusi pendidikan di Dagestan. Sebanyak 950 guru menjalani program master mereka di berbagai kurikulum yang terdapat di Institut Pasca Sarjana Pelatihan Guru Dagestan (*Dagestani Postgraduate Teacher-Training Institute*).

Di Dagestan, 300 buku pelajaran dalam tiga belas bahasa dengan total 1.926.380 salinan telah diterbitkan sejak tahun 2000. Berbagai majalah juga diterbitkan dalam bahasa-bahasa etnis minoritas. Contohnya, majalah *Dagestani Woman* diterbitkan dalam tujuh bahasa, majalah anak-anak *Falcon Fledgling* diterbitkan dalam bahasa Avar, Dargin, Kumyk, Lak, Lezgian, Nogai dan Tabasaran, majalah *Friendship* diterbitkan dalam bahasa Avar, majalah *Rainbow* diterbitkan dalam bahasa Dargin, majalah *Morning Star* diterbitkan dalam bahasa Kumyk, majalah *New Moon* diterbitkan dalam bahasa Lak, dan majalah *Samur* diterbitkan dalam bahasa Lezgian. Tidak kurang dari empat belas koran diterbitkan dalam bahasa yang berbeda (2008: 42-43). Selain itu, di Dagestan

terdapat siaran radio dalam 14 bahasa etnis minoritas. Masing-masing disiarkan selama 50 jam sehari (dalam bahasa Avar, bahasa Dargin, bahasa Kumyk, bahasa Lag, dan bahasa Lezgian) dan 20-30 menit sehari (dalam bahasa Agul, bahasa Azerbaijan, bahasa Nogai, bahasa Rutul, bahasa Tabasaran, bahasa Tsakhur, dan bahasa Chechen). Siaran televisi disiarkan dalam 12 bahasa.

Di Dagestan, 300 buku pelajaran dalam tiga belas bahasa dengan total 1.926.380 salinan telah diterbitkan sejak tahun 2000. Berbagai majalah juga diterbitkan dalam bahasa-bahasa etnis minoritas. Contohnya, majalah *Dagestani Woman* diterbitkan dalam tujuh bahasa, majalah anak-anak *Falcon Fledgling* diterbitkan dalam bahasa Avar, Dargin, Kumyk, Lak, Lezgian, Nogai dan Tabasaran, majalah *Friendship* diterbitkan dalam bahasa Avar, majalah *Rainbow* diterbitkan dalam bahasa Dargin, majalah *Morning Star* diterbitkan dalam bahasa Kumyk, majalah *New Moon* diterbitkan dalam bahasa Lak, dan majalah *Samur* diterbitkan dalam bahasa Lezgian. Tidak kurang dari empat belas koran diterbitkan dalam bahasa yang berbeda (2008: 42-43).

Politik bahasa di Dagestan dapat dikatakan unik karena di daerah ini semua bahasa ibu dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Dagestan menjadi bahasa resmi dan memiliki status yang sama dengan bahasa Rusia. Tidak adanya etnis titular adalah alasan yang paling kuat mengapa hal itu terjadi. Di satu sisi hal ini dapat menjadi masalah namun di sisi lain hal ini menjadi sebuah kelebihan karena semua kelompok etnis dapat mengembangkan dan melestarikan bahasanya tanpa dibatasi oleh status *titular* dan *non-titular*.

3.2.7 Politik Bahasa di Republik Khakasia

Republik Khakasia yang terletak di selatan Siberia telah menjadi bagian dari wilayah Rusia sejak sekitar 300 tahun yang lalu. Bahasa Khakas (*‘Хакас тили’* (Xakas tili) atau *‘Хакасский язык’* (Xakasskij Jazyk)) yang merupakan bahasa asli etnis Khakas adalah bahasa yang berasal dari rumpun bahasa Turki (Tyurk). Di dalam artikel yang ditulis oleh Tamara Borgoiakova, *Language Law in Russia: Model of Implementation in Tyva and Khakassia* (Undang-undang Bahasa di Rusia: Model Implementasi di Tyva dan Khakasia), dijelaskan bahwa bahasa Khakas mengalami perkembangan yang lumayan baik sejak runtuhnya Uni

Soviet, namun ada beberapa hal yang menjadi halangan dalam pelestarian bahasa tersebut. Sensus pada tahun 1989 mencatat bahwa 62% etnis Khakas tinggal di dalam wilayah Khakasia dan memberikan presentase sebesar 11,1% terhadap keseluruhan populasi di Khakasia. Dari 78.000 jumlah populasi etnis Khakas 76% diantaranya mengakui bahasa Khakas sebagai bahasa ibu mereka.

Sebelum runtuhnya Uni Soviet, perkembangan bahasa Khakas agak mengawatirkan. Hal ini terlihat dari hasil sensus tahun 1978 yang mencatat bahwa hanya 17% anak-anak etnis Khakas pada usia sekolah yang dapat bicara dalam bahasa Khakas dengan lancar, sedangkan 43% mengaku lebih lancar berbicara dalam bahasa Rusia, bahkan 40% diantaranya mengaku tidak bisa berbicara dalam bahasa Khakas sama sekali. Sebelum tahun 1990-an, bahasa Khakas bahkan tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah di Abakan, ibukota Khakasia.

Sepuluh tahun sejak runtuhnya Uni Soviet, bahasa Khakas mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2000-an, 35% para pelajar dapat mempelajari bahasa Khakas sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah di Abakan. Secara keseluruhan bahasa Khakas diajarkan kepada 69% anak-anak Khakas di 114 sekolah dari 275 sekolah yang ada di Khakasia. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2000-an menunjukkan bahwa anak-anak sekolah menanggapi dengan positif dan menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dari pelestarian bahasa Khakas. Di desa-desa, bahasa Khakas digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Khakas digunakan dalam percakapan antara anak-anak dengan orang tua maupun diantara teman. Anak-anak di desa-desa juga dapat membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Khakas dengan baik.

Walaupun bahasa Khakas mulai diajarkan di sekolah-sekolah tapi rupanya bahasa Khakas belum digunakan secara luas di kehidupan sehari-hari di kota. Bahasa Rusia lebih banyak digunakan dalam percakapan antar teman dan keluarga. Anak-anak juga terbiasa menjawab pertanyaan orang tua atau kakek nenek mereka menggunakan bahasa Rusia sekalipun mereka ditanya dalam bahasa Khakas. Beberapa orang tua juga lebih banyak menggunakan bahasa Rusia dengan anak-anak mereka agar anak-anak mereka memiliki prestasi akademis yang bagus di sekolahnya. Hal ini mungkin karena sejak lama Khakasia telah

menjadi bagian dari wilayah Rusia sehingga *rusifikasi* pada masa Kekaisaran dan Uni Soviet hampir memusnahkan bahasa Khakas. Banyak orang Khakas yang tidak percaya bahwa bahasa Khakas, demokrasi, dan keanekaragaman etnokultural akan terjadi di Khakasia karena stereotip negatif dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tidak hanya itu, penghambat pelestarian bahasa Khakas juga dikarenakan dalam undang-undang bahasa, bahasa Khakas bukanlah mata pelajaran wajib dan tidak semua sekolah di Abakan menyediakan kelas untuk mempelajari bahasa Khakas. Penggunaan bahasa Khakas di desa-desa lebih baik daripada di kota. Melihat hal ini, usaha untuk melestarikan bahasa Khakas perlu usaha yang lebih keras.

3.2.8 Politik Bahasa di Republik Tyva

Sama seperti Khakasia, lokasi Tyva berada di sebelah selatan Siberia. Bahasa Tyva (*‘Тыва дыл’* (Tyva dyl) atau *‘Тувинский язык’* (Tuvinskij jazyk)) merupakan cabang dari rumpun bahasa Turki. Bahasa Tyva disahkan menjadi bahasa resmi di Republik Tyva bersama dengan bahasa Rusia. Di dalam sensus tahun 1989 tercatat bahwa 96% dari total 206.000 etnis Tyva bermukim di Republik Tyva dan memberikan persentase sebesar 64% bagi komposisi penduduk di Republik Tyva. Sebesar 70% penduduk Tyva tinggal di daerah-daerah pinggiran yang hanya mempergunakan bahasa Tyva. Sebanyak 98,6% etnis Tyva menyatakan bahasa Tyva sebagai bahasa ibu mereka dan sekitar 60% yang menyatakan bahasa Rusia sebagai bahasa kedua. Pada tahun 1995-1996, 61% anak-anak etnis Tyva belajar dalam bahasa Tyva dan 22% mempelajarinya sebagai sebuah mata pelajaran. Pada tahun 2000-an, bahasa Tyva digunakan sebagai bahasa pengantar di 80% sekolah-sekolah dasar maupun sekolah lanjutan di Tyva. Perkembangan bahasa Tyva dibidang publikasi cukup baik. Pada tahun 1975 hanya ada dua koran lokal berbahasa Tyva dengan oplah sebesar 7.781, sedangkan pada tahun 2000-an berdiri delapan koran lokal berbahasa Tyva dengan oplah sebesar 14.000-25.000. Di Khakassia, terdapat sebuah koran bernama “Khakass Chiri” dengan oplah sebesar 3500 kopi. (Borgoiakova, 2002 5, 13).

Politik bahasa di Tyva menjadi model politik bahasa yang paling sukses diantara daerah-daerah lainnya di Siberia. Demografi etnis Tyva menyebabkan bahasa Tyva dapat lestari dan memperkuat posisinya sebagai bahasa resmi di Republik Tyva (Borgoiakova, 2002: 5-6).

3.3 Politik Bahasa di Federasi Rusia Sebagai Strategi Integrasi Nasional

Dari bukti-bukti yang disampaikan pada sub bab-sub bab sebelumnya terlihat bahwa pada saat ini pemerintah Federasi Rusia menggunakan pendekatan yang berbeda dengan para pendahulunya, yaitu Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet, dalam pelaksanaan politik bahasa. Pemerintah pusat tidak lagi memaksakan bahasa Rusia kepada etnis-etnis minoritas sebagai alat integrasi nasional. Dengan disahkannya Undang-Undang Tentang Bahasa-Bahasa Rakyat Federasi Rusia dan diratifikasinya Piagam Eropa Untuk Bahasa-Bahasa Regional atau Bahasa Minoritas maka seluruh rakyat Federasi Rusia, tidak peduli dari etnis minoritas maupun mayoritas, dapat dengan leluasa memilih bahasa yang ingin mereka gunakan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Geliat perkembangan dan pelestarian bahasa-bahasa kelompok etnis minoritas terlihat dengan diakuinya penggunaan bahasa-bahasa minoritas tersebut di ranah publik, seperti di siaran televisi, radio, maupun di dunia maya. Warga etnis minoritas juga menyadari bahwa melalui bahasa mereka dapat menelusuri jejak akar budaya mereka dan melalui bahasa pula mereka dapat mewariskannya kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, bahasa-bahasa etnis minoritas dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan diajarkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi.

Dengan politik bahasa yang baru, yang dilakukan oleh pemerintah Federasi Rusia menumbuhkan semangat multilingualisme dan multikulturalisme yang ditunjukkan melalui politik bahasa dengan implementasinya dalam pelestarian bahasa dan budaya membuat kehidupan di Rusia menjadi lebih harmonis. Ketegangan antara pusat dan daerah pun dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan pengakuan terhadap sebuah bahasa berarti juga mengakui budaya sebuah kelompok etnis, terlebih lagi mengakui eksistensi dan identitas kelompok etnis-etnis minoritas ini. Pemerintah Federasi Rusia memilih politik bahasa yang lebih

demokratis daripada pendahulunya, baik Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet. Dibandingkan pada masa Uni Soviet, dimana *rusifikasi* dilakukan dengan intensitas yang sangat tinggi, yang menekan etnis-etnis lainnya agar memakai identitas etnis Rusia, akhirnya malah berujung dengan runtuhnya negara tersebut dan kembalinya etnis-etnis *titular* kepada identitas asli mereka.

Jika dilihat dari teori integrasi nasional Myron Wener, Uni Soviet memakai strategi asimilasi, dimana pemerintahan pada waktu itu menjadikan budaya mayoritas, khususnya bahasa Rusia, sebagai budaya nasional, sehingga kebudayaan etnis mayoritas mendominasi kebudayaan etnis minoritas.

Mengintegrasikan heterogenitas etnis ke dalam suatu budaya politik yang matang merupakan usaha yang tidak mudah. Oleh karena loyalitas etnis dan primordialisme bisa menjadi kuat ketika dicoba diintegrasikan, terutama jika melalui cara-cara pemaksaan atau dengan menghilangkan identitas-identitas etnisnya. Cara-cara tersebut akan menjadi kontraproduktif bagi pembentukan budaya politik yang integral (Abdilah, 2002: 107).

Ketika budaya mayoritas dipaksakan kepada budaya minoritas maka budaya minoritas akan kembali kepada identitasnya yang semula dan itulah yang terjadi ketika Uni Soviet runtuh dan kelima belas negara pecahannya memerdekakan diri. Proses penyeragaman identitas etnis pada masa Uni Soviet dengan berpanutan pada budaya dan bahasa etnis Rus malah membuat ketidakseragaman dan menimbulkan ‘strata-strata’ etnis. Satu etnis mayoritas yang dianggap sebagai etnis ‘unggulan’, sedangkan etnis lainnya dianggap sebagai etnis ‘rendahan’.

Pemerintah Federasi Rusia nampaknya saat ini mencoba untuk mengintegrasikan etnis-etnis di wilayah kekuasaannya dengan strategi integrasi Myron Wyner kedua, yaitu *unity in diversity*. Integrasi nasional dilakukan dengan tidak meninggalkan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas sehingga identitas etnis minoritas tetap diakui sama seperti identitas etnis mayoritas. Identitas kelompok-kelompok etnis yang beraneka ragam itu, khususnya bahasa, yang memang antara satu dan lainnya secara alami berbeda, tidak akan membuat dikotomi etnis “unggulan” dan etnis “rendahan”. Integrasi nasional dengan strategi *unity in diversity* itu terlihat dari politik bahasa yang dilakukan oleh pemerintah Federasi Rusia.

Simpulan Analisis:

Terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab ketiga ini. Hal pertama yang disimpulkan berasal dari sub bab pertama, yaitu munculnya semangat multilingualisme di Federasi Rusia. Dari peraturan perundangan yang tentang bahasa terlihat bahwa pemerintah Federasi Rusia memberikan dukungan terhadap pelestarian dan penggunaan bahasa kelompok-kelompok etnis selain etnis Rus. Fragmen penguasaan bahasa pada sensus penduduk tahun 2002 di Rusia dan keikutsertaan Buranovskie Babushki dalam ajang kontes Eurovison 2012 turut menambah bukti munculnya multilingualisme di Rusia

Kesimpulan kedua didapatkan dari sub bab kedua, yaitu bahwa penerapan politik bahasa yang dilakukan di Rusia saat ini berbeda dengan penerapan politik bahasa yang dilakukan pada masa Kekaisaran maupun Uni Soviet. Pemerintah tidak lagi berusaha untuk mengesampingkan penggunaan bahasa etnis-etnis minoritas. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa di republik-republik yang ada di Federasi Rusia boleh menggunakan bahasa etnis *titular*-nya sebagai bahasa resmi di dalam wilayah republik yang bersangkutan bersamaan dengan penggunaan bahasa Rusia.

Politik bahasa yang dilaksanakan di republik-republik di Federasi Rusia tidak memberikan hasil yang sama karena setiap republik memiliki kompleksitasnya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi faktor bagi pelaksanaan politik bahasa adalah undang-undang yang disahkan di tiap republik, program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat sebagai implementasi politik bahasa di daerahnya, persentase etnis *titular* terhadap keseluruhan populasi, dan banyaknya kelompok-kelompok etnis yang tinggal di republik yang bersangkutan.

Ketika bahasa sebuah kelompok etnis mendapat kesempatan untuk dapat melestarikan, mengembangkan, bahkan menjadikan bahasa mereka sebagai bahasa resmi, maka akan terdapat kesempatan bagi mereka untuk menelusuri identitas asli budayanya dan sekaligus melestarikannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Federasi Rusia tidak memaksakan identitas dan budaya etnis mayoritas, yaitu etnis Rus, sebagai satunya-satunya identitas yang

merepresentasikan Rusia secara keseluruhan dan memaksa kelompok etnis lain untuk menghilangkan identitas asli mereka agar menjadi sama dengan etnis Rus. Jadi, hal terakhir yang dapat disimpulkan dari bab analisis ini adalah bila pada masa Kekaisaran dan Uni Soviet, pemerintah yang berkuasa pada saat itu menggunakan asimilasi sebagai strategi integrasi nasional, maka saat ini pemerintah Federasi Rusia menggunakan model *unity in diversity* sebagai strategi integrasi nasionalnya.



BAB 4 KESIMPULAN

Politik bahasa, identitas etnis, dan integrasi nasional adalah tiga hal yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Bahasa yang menjadi salah satu identitas etnis ternyata dapat menjadi objek politik, khususnya untuk mengintegrasikan masyarakat multibahasa. Hal demikian dapat dilihat dari sejarah Rusia. Di dalam sejarah Rusia, khususnya sebelum runtuhnya Uni Soviet, terlihat bagaimana pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa pada masa itu menggunakan kebudayaan etnis mayoritas, yaitu etnis Rus, sebagai kebudayaan dan identitas nasional untuk menjaga integrasi nasional. Hal ini terlihat melalui pemaksaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi.

Pada masa pasca runtuhnya Uni Soviet, terlihat bahwa politik bahasa di Rusia diterapkan dengan cara yang lain. Melalui data-data yang diperoleh oleh penulis, perubahan penerapan politik bahasa tersebut terlihat dari dua hal. Pertama, munculnya semangat multilingualisme di Rusia. Multilingualisme itu terlihat tidak hanya dari peraturan perundangan yang disahkan oleh pemerintah Federasi Rusia, namun juga dapat terlihat dari bagaimana pemerintah Federasi Rusia membuat pertanyaan untuk sensus penduduk tahun 2002. Dalam kehidupan sehari-hari pun, masyarakat telah mempraktekan hal ini, seperti yang dapat terlihat dalam keikutsertaan Buranovskie Babushki dalam kontes menyanyi Eurovision tahun 2012.

Kedua, dari pelaksanaan politik bahasa di beberapa republik di Federasi Rusia terlihat bahwa pemerintah Federasi Rusia kini memberikan kelonggaran terhadap ekspresi identitas budaya etnis-etnis minoritas, termasuk penggunaan bahasa etnis *titular* sebagai bahasa resmi berdampingan dengan bahasa Rusia. Contohnya, Republik Buryatia boleh menggunakan bahasa Buryat sebagai bahasa resmi di daerahnya, Republik Tatarstan juga boleh menggunakan bahasa Tatar sebagai bahasa resmi di daerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan juga melestarikan bahasa kelompok-kelompok etnis minoritas.

Meskipun tujuan utama dari diselenggarakannya politik bahasa pada masa Federasi adalah untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa kelompok-kelompok etnis minoritas tetapi penulis melihat bahwa pengembangan dan pelestarian sebuah bahasa juga akan berdampak bagi pengguna bahasa tersebut karena bahasa adalah salah satu bentuk identitas yang penting. Hal ini dapat dilihat pada saat republik-republik di Federasi Rusia berusaha untuk mengembangkan serta melestarikan bahasa mereka, mereka juga melestarikan kebudayaan mereka. Pada akhirnya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Federasi Rusia saat ini memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok etnis di Rusia untuk kembali menelusuri budaya nenek moyang mereka dan identitas asli mereka.

Penerapan politik bahasa di Rusia menunjukkan bahwa pemerintah Federasi Rusia tidak mencoba memaksakan kebudayaan etnis mayoritas, yaitu etnis Rus, menjadi kebudayaan dan identitas nasional, seperti yang pernah dilakukan pada masa Kekaisaran dan masa Uni Soviet. Pemerintah Federasi Rusia mencoba untuk merangkul semua kebudayaan kelompok-kelompok etnis di Rusia sehingga identitas maupun kebudayaan kelompok-kelompok etnis tersebut tidak tersisihkan. Di dalam integrasi nasional, peran identitas etnis mayoritas dan etnis minoritas menjadi penting artinya. Dari sini penulis berkesimpulan bahwa pemerintah Federasi Rusia tidak lagi mengikuti langkah pendahulu-pendahulunya, yaitu pemerintahan Kekaisaran dan pemerintahan Uni Soviet, dalam menyatukan rakyatnya yang terdiri dari berbagai macam etnis dengan strategi integrasi nasional model asimilasi. Penulis berpendapat bahwa strategi integrasi nasional yang kini dicoba terapkan adalah integrasi nasional model *unity in diversity*.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdilah S., Ubed. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiatara, 2002.
- Alkatiri, Zeffry. *Transisi Demokrasi di Negara Federasi Rusia: Analisis Perlindungan HAM 1991-2000*. Depok: Komunitas Bambu, 2007.
- Anwar, Khaidir. *Fungsi dan Peranan Bahasa: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.
- Bremmer, Ian and Ray Taras (ed.) *Nations Politics in the Soviet Successor States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Brown, Archie, Michael Kaser, and Gerald S. Smith. *The Cambridge Encyclopedia of Russia and Former Soviet Union*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Cornell, Stephen Ellicott and Douglas Hartmann. *Racial and Ethnic Relation: Making Identities in A Changing World*. 2nd edition. London: Pine Forge Press, 2007.
- Coleman, James S. dan Carl G. Rosberg Jr. *Political Parties and National Integration in Tropical Africa*. Los Angeles: University California Press, 1966.
- Fahrurodji, A., *Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Fowkes, Ben. *Ethnicity and Ethnic Conflict in the Post-Communist World*. New York: Pelgrave, 2002.
- Gorbachev, Mikhail. *Pemikiran Baru untuk Negara Kami dan Dunia* (terj.). Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1987.
- Hosking, Geoffrey. *Russia and the Russian*. London: Penguin Books, 2001.
- Kushartanti, Untung Yuwono, dan Multamia RMT Lauder. *Pesono Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kolarz, Walter. *Russia and Her Colonies*. London: George Philip and Son, 1952.
- Lamont, Corliss. *Soviet Civilization*. New York: Philosophical Library, 1952.

Suriasumantri, Jujun S., *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*, dalam M. Deden Ridwan, ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: “Nuansa”, 2001.

Walsh, Warren B. *Russia and the Soviet Union: A Modern History*. Michigan: University of Michigan, 1958.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: “Yayasan Obor Indonesia”, 2004.

Zisserman-Brodsky, Dina. *Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the Rise of Ethnic Nationalis*. New York: Palgrave Mcmillan, 2003.

Kamus:

Belkina, E.S., dkk., *Russko – indonezijskij slovar’*. Moskva: Izdatel’stvo <<Sovetskaja Enciklopedija>>, 1972.

Sumber Internet:

Bucholtz, Mary. “From Mulatta to Mestiza” (ed.), *Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self*. Ed. Kira Hall and Mary Bucholtz. New York: Routledge. 351-371. 15 Jun. 2012
<http://www.linguistics.ucsb.edu/faculty/bucholtz/articles/MB_GenderArt.pdf>.

Вojko, Jurij. “Проблемы национальной интеграции российского общества в эпоху глобализации.” *Наша Власть: дела и лица* 2008. 6 Juni 2012.
<http://nashavlast.ru/article_description/82/356.html>.

----- . “Социально-психологические аспекты национальной интеграции.” *Обозреватель – Observer* 2008. 6 Juni 2012.
<http://www.rau.su/observer/N5_2008/029_036.pdf>.

Commission of the Central Committee of the C.P.S.U. (B.) (ed.), *History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolsheviks)*. New York: Internasional Publisher, 2006. 4 Jun. 2012
<<http://www.marx2mao.com/PDFs/HCPSU39.pdf>>

- Commission of the Russian Federation for UNESCO. *Preservation of Linguistic Diversity: Russian Experience*. Moscow: 2008. 11 Jun 2012.
<www.ifapcom.ru/files/publications/sb_eng.pdf>.
- Dietrich, Ayse Pamir. "Language Policy and the Status of Russian in the Soviet Union and the Successor States outside the Russian Federation" *ASEES* 19(2005) 7 Maret 2012 < <http://miskinhill.com.au/journals/asees/19:1-2/language-policy-status-of-russian.pdf>>.
- Dickens, Mark. "The Uzbek" (1990). 19 Mei 2012
<<http://www.oxuscom.com/Uzbeks.pdf>>.
- Dolbilov, Mikhail. "Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire" 28 Mei 2012
<http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no13_ses/07_dolbilov.pdf>.
- Fisher, Peter Nigel. "Towards National Integration or Chaos? Social Conflict and the African One-Party State" (1971). *Open Access Dissertations and Theses*. Paper 4809. 15 Juli 2012
<<http://digitalcommons.mcmaster.ca/opendissertations/4809>>.
- Greymorning, Stephen. "Culture and Language: The Political Realities To Keep Trickster at Bay." *The Canadian Journal of Native Studies* XX (2000) 2 April 2012
<http://www2.brandonu.ca/library/cjns/20.1/cjnsv20no1_pg181-196.pdf>.
- Kuznesov, S. N., "Язык и политика" Филологический факультет МГУ им. Ломоносова 2008. 23 Februari 2012
<<http://www.philol.msu.ru/data/programs/yazpolit.pdf>>.
- Leprière, Marc. "Language Policy in the Russian Federation: Language Diversity and National Identity". *Sociolingüística Internacional*. 2002. 21 Maret 2012. << <http://www.gencat.cat/llengua/noves>>>.
- Ornstein, Jacob. "Soviet Language Policy: Theory and Practice." *The Slavic and East European Journal* 3 1959: 1-24 *American Association of the Teachers of Slavic and East European Languages*. JSTOR. Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok. 31 Mei 2012 <<http://www.jstor.org/>>.
- Poslednyh, O. N. "Возможности использования переписных данных в целях имплементации европейской региональных языков и языков

- меньшинств в России” *Этнографическое обозрение* (2010) 15 Mei 2012
 <http://journal.iea.ras.ru/archive/2010s/2010/Podlesnykh_2010_4.pdf>.
- Rezakhani, Khodadad. “The Iranian Language Family” 21 Mei 2012
 <<http://www.iranologie.com/history/ilf.html>>
- Simonsen, Sven Gunnar.” Inheriting the Soviet Policy Toolbox: Russia’s Dilemma Over Ascriptive Nationality.” *Europe-Asia Studies*, 1999: 1069-1087. 30 Mei 2012. <<http://weblearn.ox.ac.uk>>.
- Vincent, K. Steven. “*Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865)*.” *Encyclopedia of 1848 Revolutions*. 1999. University of Ohio. 3 Apr. 2012. <<http://www.ohio.edu/chastain/ip/proudhon.htm>>.
- Weeks, Theodor R. “*Russification: Word and Practice 1863-1914*.” *American Philosophical Society* 148 (2004) 17 Maret 2012 <<http://www.amphilsoc.org/sites/default/files/480407.pdf>>.
- Weiner, Myron. “Political Integration and Political Development.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* Mar. 1965: 52-64 Sage Publication, Inc. JSTOR. Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok. 29 Maret 2012 <<http://www.jstor.org/>>.
- Whaley, Lindsay. “Introduction to the Study of Tungusic Languages.” The Tungusic Research Group at Dartmouth College (1998). 19 Mei 2012. <http://www.dartmouth.edu/~trg/languages.html>
- Zhurzhenko, Tatiana “Language Politics” in Contemporary Ukraine: Nationalism and Identity Formation” (2002) *IWM Junior Visiting Fellows Conferences, XII/2* 29 Mei 2012 < www.iwm.at/publ-jvc/jc-12-02.pdf>
- Ščerdina, O. V. “Возможна ли мультикультурная модель интеграции мигрантов в России?” *Демоскоп Weekly* 23 Januari-5Februari 2006. 6 Juni 2012 <<http://demoscope.ru/weekly/2006/0231/analit02.php>>.
- “Russian Federation” *UN Data* Vers. v0.14.6 Beta. 2012. Country Profile 1 Apr. 2012
 <<http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Russian%20Federation>>
- “*Конституция российской федерации*” Гарант-Интернет Vers. 2001 г. 4 Feb. 2012 <<http://constitution.ru/>>

“Европейская хатя региональных языков или языков меньшинств” Council of Europe 4 Feb. 2012 <<http://www.coe.int/>>.

“О языках народов российской федерации” diunduh dari <<http://base.consultant.ru>> pada 19 Jun. 2012.

“Национальный состав населения Российской Федерации” Федеральная служба государственной статистики 31 Mei 2012 <<http://www.gks.ru>>



Lampiran 1: Undang-Undang Bahasa Rakyat Federasi Rusia

25 октября 1991 года

N 1807-1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**ЗАКОН****О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ,
от 11.12.2002 N 165-ФЗ)

Вводная часть

Языки народов Российской Федерации - национальное достояние Российского государства.

Языки народов Российской Федерации находятся под защитой государства.

Государство на всей территории Российской Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия.

Настоящий Закон направлен на создание условий для сохранения и равноправного и самобытного развития языков народов Российской Федерации и призван стать основой для формирования системы правового регулирования деятельности юридических и физических лиц, разработки нормативных правовых актов в целях реализации положений настоящего Закона.

В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и пренебрежения к любому языку, создание противоречащих конституционно установленным принципам национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иные нарушения законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации.

(преамбула в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Законодательство Российской Федерации о языках народов Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, подлежащие правовому регулированию, и не устанавливает юридические нормы использования языков народов Российской Федерации в межличностных неофициальных взаимоотношениях, а также в деятельности общественных и религиозных объединений и организаций.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков народов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Равноправие языков народов Российской Федерации - совокупность прав народов и личности на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения.

2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные права на сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения.

3. Российская Федерация гарантирует каждому право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества независимо от его происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания.

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом. Никто не вправе устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нормы, устанавливаемые настоящим Законом, распространяются на граждан Российской Федерации, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.

Статья 3. Правовое положение языков

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои государственные языки.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

(п. 3 введен Федеральным законом от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. В местности компактного проживания населения, не имеющего своих национально-государственных и национально-территориальных образований или живущего за их пределами, наряду с русским языком и государственными языками республик, в официальных сферах общения может использоваться язык населения данной местности. Порядок использования языков в таких местностях определяется законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

5. Государство признает равные права всех языков народов Российской Федерации на их сохранение и развитие. Все языки народов Российской Федерации пользуются поддержкой государства.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Положения пункта 6 о строении алфавита государственных языков республик на графической основе кириллицы и возможности установления иных графических основ алфавитов данных языков федеральными законами признаны не противоречащими Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 N 16-П.

6. В Российской Федерации алфавиты государственного языка Российской Федерации и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы алфавитов государственного языка

Российской Федерации и государственных языков республик могут устанавливаться федеральными законами.

(п. 6 введен Федеральным законом от 11.12.2002 N 165-ФЗ)

Статья 4. Гарантии защиты языков народов Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту всех языков народов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на территории Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проведение в этих целях льготной налоговой политики.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности юридических и физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 5. Гарантии прав граждан Российской Федерации вне зависимости от их знания языка

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Государство гарантирует гражданам Российской Федерации осуществление основных политических, экономических, социальных и культурных прав вне зависимости от их знания какого-либо языка.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Знание или незнание языка не может служить основанием для ограничения языковых прав граждан Российской Федерации. Нарушение языковых прав народов и личности влечет за собой ответственность согласно закону.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 6. Компетенция Российской Федерации в сфере охраны, изучения и использования языков народов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Ведению Российской Федерации в лице высших органов государственной власти Республики в сфере охраны и использования языков народов Российской Федерации подлежат:

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

установление общих принципов законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

содействие развитию государственных языков республик;

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп, не имеющих своих национально-государственных и национально-территориальных образований или проживающих за их пределами; содействие изучению языков народов Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 7. Программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные целевые программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации и осуществляет меры по реализации таких программ. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут разрабатывать соответствующие региональные целевые программы.

В программах сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации предусматриваются обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик и иных языков народов Российской Федерации, содействие изданию литературы на языках народов Российской Федерации, финансирование научных исследований в области сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, создание условий для распространения через средства массовой информации сообщений и материалов на языках народов Российской Федерации, подготовка специалистов в указанной области, совершенствование системы образования в целях развития языков народов Российской Федерации и иные меры.

2. Средства на финансирование федеральных целевых программ сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации или соответствующих региональных целевых программ предусматриваются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год или законами субъектов Российской Федерации.

Глава II. ПРАВА ГРАЖДАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 8. Право на выбор языка общения

В сферах общения, подлежащих правовому регулированию в соответствии с настоящим Законом, право выбора и использования языка общения гражданами Российской Федерации определяется законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 9. Право на выбор языка воспитания и обучения

1. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка воспитания и обучения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.

Право граждан Российской Федерации на получение образования на родном языке обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, групп, а также созданием условий для их функционирования.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Право выбора образовательного учреждения с тем или иным языком воспитания и обучения детей принадлежит родителям или лицам, их заменяющим в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Язык (языки), на котором ведется воспитание и обучение в образовательном учреждении, определяется учредителем (учредителями) образовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

5. Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных и национально-территориальных образований, а также не имеющим таковых, представителям малочисленных народов и этнических групп государство оказывает содействие в организации различных форм воспитания и обучения на родном языке независимо от их количества и в соответствии с их потребностями.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 10. Изучение и преподавание языков народов Российской Федерации
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для изучения и преподавания родного языка и других языков народов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Русский язык как государственный язык Российской Федерации изучается в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования. В имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, за исключением дошкольных образовательных учреждений, изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации регулируется государственными образовательными стандартами.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Преподавание государственных и иных языков в республиках осуществляется в соответствии с их законодательством.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Каждый народ Российской Федерации, не имеющий своей письменности, обладает правом создавать письменность на родном языке. Государство обеспечивает для этого необходимые условия.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

5. Государство создает условия для научных исследований всех языков народов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

**Глава III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАБОТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ**

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 11. Язык работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления

самоуправления осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик наряду с государственным языком Российской Федерации могут употребляться государственные языки республик.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. На заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы, комитетов и комиссий палат, на парламентских слушаниях члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы вправе выступать на государственных языках республик или иных языках народов Российской Федерации при обеспечении перевода выступления на государственный язык Российской Федерации в соответствии с регламентами палат Федерального Собрания Российской Федерации.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Языком проектов федеральных конституционных законов, проектов федеральных законов, проектов актов палат Федерального Собрания Российской Федерации, внесенных на рассмотрение Государственной Думы и переданных на рассмотрение Совета Федерации, является государственный язык Российской Федерации.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 12. Язык официального опубликования федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации официально публикуются на государственном языке Российской Федерации.

В республиках указанные правовые акты наряду с официальным опубликованием могут публиковаться на государственных языках республик.

Статья 13. Язык официального опубликования законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Законы и иные нормативные правовые акты республик наряду с официальным опубликованием на государственном языке Российской Федерации могут официально публиковаться на государственных языках республик.

2. Законы и иные нормативные правовые акты краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов официально публикуются на государственном языке Российской Федерации.

В необходимых случаях указанные нормативные правовые акты наряду с официальным опубликованием могут публиковаться на языках народов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Статья 14. Язык подготовки и проведения выборов и референдумов в Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. При подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации используется государственный язык Российской Федерации. При подготовке и проведении выборов и референдумов в Российской Федерации

республики наряду с государственным языком Российской Федерации вправе использовать государственные языки республик и языки народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания; иные субъекты Российской Федерации наряду с государственным языком Российской Федерации вправе использовать также языки народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания.

2. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме печатаются на государственном языке Российской Федерации. По решению соответствующей избирательной комиссии, комиссии референдума бюллетени печатаются на государственном языке Российской Федерации и на государственном языке соответствующей республики, а в необходимых случаях также на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Если для избирательного участка, участка референдума бюллетени печатаются на двух и более языках, текст на государственном языке Российской Федерации должен помещаться в каждом избирательном бюллетене, бюллетене для голосования на референдуме. Протоколы итогов голосования, результатов выборов и референдумов оформляются на государственном языке Российской Федерации, а при необходимости также на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания.

**Глава IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ**
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 15. Использование языков в работе государственных органов, организаций, предприятий и учреждений

1. В деятельности государственных органов, организаций, предприятий и учреждений Российской Федерации используются государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик и иные языки народов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Гражданам Российской Федерации, не владеющим государственным языком Российской Федерации и государственным языком республики, предоставляется право выступать на заседании, совещании, собрании в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях на том языке, которым они владеют. В случае необходимости обеспечивается соответствующий перевод.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. Гражданам Российской Федерации, не владеющим тем языком, на котором ведется заседание, совещание, собрание в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях, в случае необходимости обеспечивается перевод на приемлемый для этих граждан язык или на государственный язык Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Граждане Российской Федерации вправе обращаться в государственные органы, организации, на предприятия и в учреждения Российской Федерации с предложениями, заявлениями, жалобами на государственном языке Российской Федерации, родном языке или на любом другом языке народов Российской Федерации, которым они владеют.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

5. Ответы на предложения, заявления и жалобы граждан Российской Федерации, направленные в государственные органы, организации, на предприятия и в учреждения Российской Федерации, даются на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный язык Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

6. Положениями о языковых квалификационных требованиях Российской Федерации и республик могут предусматриваться определенные ограничения и нормы по использованию языков в сфере профессионального общения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 16. Использование языков в официальном делопроизводстве

1. На территории Российской Федерации официальное делопроизводство в государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях ведется на русском языке как государственном языке Российской Федерации. Официальное делопроизводство в республиках ведется также на государственных языках данных республик. Порядок использования языков в официальном делопроизводстве определяется законодательством Российской Федерации и республик.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями государственных органов, организаций, предприятий и учреждений оформляются на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик и иных языках народов Российской Федерации, определяемых законодательством республик.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. В необходимых случаях официальное делопроизводство в субъектах Российской Федерации наряду с государственным языком Российской Федерации, государственными языками республик может вестись на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Порядок использования языков народов Российской Федерации в официальном делопроизводстве на указанных территориях определяется законодательством субъектов Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, записи актов гражданского состояния, трудовые книжки, а также документы об образовании, военные билеты и другие документы оформляются с учетом национальных традиций именованья на государственном языке Российской Федерации, а на территории республики, установившей свой государственный язык, оформление указанных документов наряду с государственным языком Российской Федерации может вестись на государственном языке республики.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 17. Использование языков в официальной переписке

Официальная переписка и иные формы официальных взаимоотношений между государственными органами, организациями, предприятиями, учреждениями субъектов Российской Федерации с адресатами в Российской Федерации ведутся на государственном языке Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 18. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах и делопроизводства в правоохранительных органах

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, других федеральных арбитражных судах, военных судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах Российской Федерации ведется на государственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных судах общей

юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на территории которой находится соответствующий суд.

2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов Российской Федерации, а также делопроизводство в правоохранительных органах субъектов Российской Федерации ведется на государственном языке Российской Федерации или на государственном языке республики, на территории которой находится соответствующий суд или правоохранительный орган.

3. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и делопроизводство в судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Статья 19. Использование языков в нотариальном делопроизводстве

1. Правила определения языка судопроизводства распространяются на язык нотариального делопроизводства в государственных нотариальных конторах и в других государственных органах, выполняющих функции нотариального делопроизводства.

2. Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации, если гражданин, обратившийся за совершением нотариального действия, не владеет тем языком, на котором ведется делопроизводство.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 20. Язык средств массовой информации

1. Издание всероссийских газет и журналов, передачи всероссийского телевидения и радиовещания осуществляются на русском языке как государственном языке Российской Федерации. Всероссийские газеты и журналы могут также по усмотрению учредителей издаваться на иных языках.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. В средствах массовой информации субъектов Российской Федерации используются русский язык, государственные языки республик, а также иные языки народов, проживающих на их территориях.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. При переводе и дублировании кино- и видеопродукции используются государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик и другие языки с учетом интересов населения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

4. Порядок использования языков в средствах массовой информации определяется законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 21. Языки, используемые в сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики

1. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на всей территории Российской Федерации применяется русский язык как государственный язык Российской Федерации, а также другие языки в соответствии с международными и межреспубликанскими договорами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. В сферах промышленности, связи, транспорта и энергетики на местном уровне наряду с государственным языком Российской Федерации, государственными языками республик могут употребляться другие языки с учетом интересов местного населения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 22. Языки, используемые в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности

1. Порядок использования языков в сфере обслуживания и в коммерческой деятельности определяется законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Отказ в обслуживании граждан под предлогом незнания языка недопустим и влечет за собой ответственность согласно законодательству Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Делопроизводство в сфере обслуживания и коммерческой деятельности ведется на государственном языке Российской Федерации и иных языках, предусмотренных договорами между деловыми партнерами.

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Глава V. ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, НАДПИСЕЙ, ДОРОЖНЫХ И ИНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 23. Язык наименований географических объектов, надписей, дорожных и иных указателей

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Написание наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей производятся на государственном языке Российской Федерации. Республики вправе написание наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей производить на государственных языках республик наряду с государственным языком Российской Федерации.

2. Субъекты Российской Федерации в необходимых случаях вправе написание наименований географических объектов и оформление надписей, дорожных и иных указателей наряду с государственным языком Российской Федерации производить на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания.

3. Порядок использования языков при написании наименований географических объектов и оформлении надписей, дорожных и иных указателей определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Обязанности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению написания наименований географических объектов и оформления надписей, дорожных и иных указателей

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечивать написание наименований географических объектов, оформление и поддержание в надлежащем порядке надписей, дорожных и иных указателей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и международными стандартами.

Статья 25. Исключена. - Федеральный закон от 24.07.1998 N 126-ФЗ.

**Глава VI. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ
В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ**

Universitas Indonesia

**СТРАНАМИ, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СУБЪЕКТАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 26. Использование языков в отношениях Российской Федерации с зарубежными странами и международными организациями
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

1. Деятельность зарубежных представительств Российской Федерации, внешнеполитических, внешнеэкономических и иных учреждений Российской Федерации осуществляется на государственном языке Российской Федерации и на языке соответствующей страны.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

2. Договоры, соглашения и иные международные акты, заключаемые от имени Российской Федерации, оформляются на государственном языке Российской Федерации и на языке другой договаривающейся стороны либо на иных языках по взаимной договоренности сторон.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

3. В переговорах от имени Российской Федерации с представителями других стран, международных организаций используются государственный язык Российской Федерации и иные языки по взаимной договоренности сторон и в соответствии с международными соглашениями.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 27. Язык, используемый в отношениях Российской Федерации с субъектами Российской Федерации

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

В отношениях Российской Федерации с субъектами Российской Федерации используется государственный язык Российской Федерации.

**Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЯЗЫКАХ НАРОДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации

Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации о языках народов Российской Федерации, влекут за собой ответственность и обжалуются в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 24.07.1998 N 126-ФЗ)

Президент РСФСР
Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов РСФСР
25 октября 1991 года
N 1807-1

Lampiran 2: Data sensus penduduk Federasi Rusia tahun 2010 berdasarkan etnis



Sumber: www.gks.ru

Lampiran 3: Hasil sensus penduduk tahun 2010 terhadap pengakuan bahasa etnis dan bahasa Rusia sebagai bahasa ibu



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ, %

93,8% населения назвали родным языком язык соответствующей национальности

5,7% населения (кроме русских) указали родным русский язык

- Например, родным указали русский язык 40% коми, 38% удмуртов, 35% мордвы, 29% чувашей, 25% марийцев и 20% татар

Sumber: www.gks.ru

Lampiran 4: Laporan mengenai komposisi penduduk, penguasaan bahasa, dan kewarganegaraan pada sensus penduduk tahun 2010 di Federasi Rusia

6. Национальный состав, владение языками, гражданство.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых. При рассмотрении национального состава населения следует иметь в виду, что на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности. В связи с этим в 2010 г. у 5,6 млн. человек (почти 4,0%, в 2002 г. – 1,5 млн. человек, или 1%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности, из них о 3,6 млн. человек сведения получены из административных источников, а 2 млн. человек не определили свою национальную принадлежность.

Изменение численности населения наиболее многочисленных национальностей характеризуется следующими данными¹⁷:

	Млн. человек		В % к указавшим национальную принадлежность	
	2002 г.	2010 г.	2002 г.	2010 г.
Все население	145,17	142,86		
в том числе указавшие национальную принадлежность	143,71	137,23	100,0	100,0
русские	115,89	111,02	80,64	80,90
татары	5,55	5,31	3,87	3,87
украинцы	2,94	1,93	2,05	1,41
башкиры	1,67	1,58	1,16	1,15
чуваши	1,64	1,44	1,14	1,05

¹⁷ Национальности перечислены в порядке убывания численности населения по 2010 г.

	Млн. человек		В % к указавшим национальную принадлежность	
	2002 г.	2010 г.	2002 г.	2010 г.
чеченцы	1,36	1,43	0,95	1,04
армяне	1,13	1,18	0,79	0,86
аварцы	0,81	0,91	0,57	0,66
мордва	0,84	0,74	0,59	0,54
казахи	0,65	0,65	0,46	0,47
азербайджанцы	0,62	0,60	0,43	0,44
даргинцы	0,51	0,59	0,35	0,43
удмурты	0,64	0,55	0,44	0,40
марийцы	0,60	0,55	0,42	0,40
осетины	0,51	0,53	0,36	0,39
белорусы	0,81	0,52	0,56	0,38
кабардинцы	0,52	0,52	0,36	0,38
кумыки	0,42	0,50	0,29	0,37
якуты (саха)	0,44	0,48	0,31	0,35
лезгины	0,41	0,47	0,29	0,35
буряты	0,45	0,46	0,31	0,34
ингуши	0,41	0,44	0,29	0,32
другие национальности	4,85	4,81	3,40	3,51
не указавшие национальную принадлежность и лица, по которым сведения получены из административных источников	1,46	5,63		

Из общего числа частных домохозяйств, состоящих из 2 и более человек, 84 % домохозяйств являются мононациональными, где все члены домохозяйства принадлежат к одной национальности.

В 2010 г. владение русским языком указало 138 млн. человек (99,4% из числа ответивших о на вопрос о владении русским языком), в 2002 г. – 142,6 млн. человек (99,2%). Среди горожан владели русским языком 101 млн. человек (99,8%), а среди сельского населения – 37 млн. человек (98,7%).

Среди **других языков** наиболее распространенными являются английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, украинский, чувашский.

Владение русским жестовым языком глухих указали 121 тыс. человек.

Численность **граждан Российской Федерации** составила 137,9 млн. человек (99,4% лиц указавших гражданство), 0,7 млн. человек имеют гражданство других государств и 0,2 млн. человек – лица без гражданства. Из общей численности граждан Российской Федерации 79 тыс. человек имеют два гражданства. У более 4,1 млн. человек в переписном листе гражданство не указано.

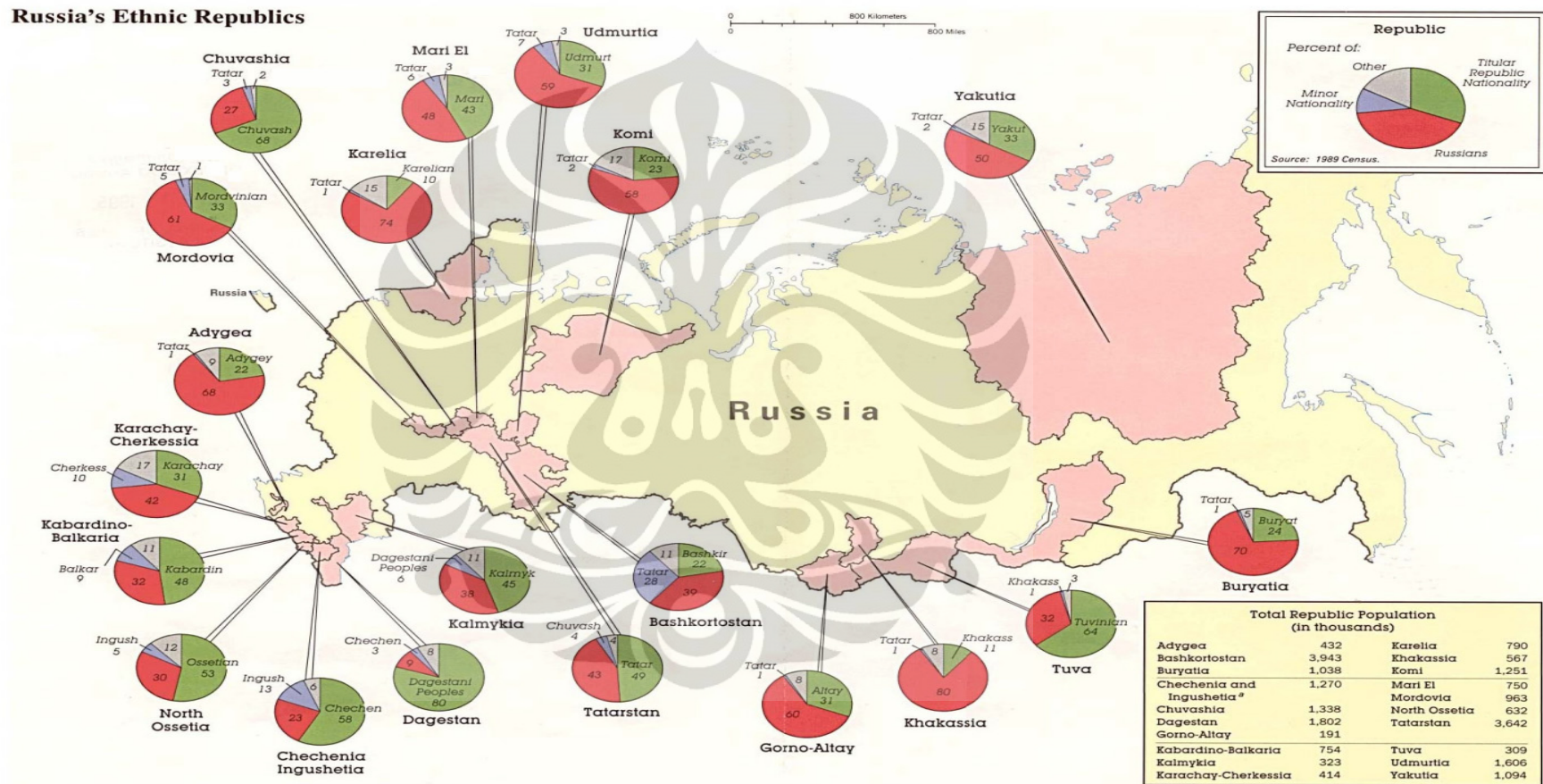
Изменение гражданства населения России за межпереписной период видно из следующих данных:

	Тыс. человек		В % к указавшим гражданство	
	2002 г.	2010 г.	2002 г.	2010 г.
Все население	145167	142857		
в том числе:				
указавшие гражданство	143898	138722	100,0	100,0
из них				
граждане России	142443	137857	98,99	99,38
из них имеющие два гражданства	44	79	0,03	0,06
иностранцы граждане	1025	687	0,71	0,49
из них имеющие гражданство:				
государств-участников СНГ	853	579	0,59	0,42
в том числе:				
Азербайджана	155	68	0,10	0,05
Армении	137	59	0,10	0,04
Беларуси	40	28	0,03	0,02
Казахстана	69	28	0,05	0,02
Киргизии	29	45	0,02	0,03
Молдавии	51	34	0,04	0,02
Таджикистана	64	87	0,04	0,07
Туркмении	6	6	0,00	0,00
Узбекистана	71	131	0,05	0,10
Украины	231	93	0,16	0,07
других государств	172	108	0,12	0,07
без гражданства	430	178	0,30	0,13
не указавшие гражданство и лица, по которым сведения получены из административных источников	1269	4135		

Sumber: www.gks.ru

Universitas Indonesia

Lampiran 5: Peta republik-republik di Federasi Rusia dan populasi etnis-etnis di dalamnya



Sumber: <http://www.freelang.net/families/maps/russia-ethnic-republics-94.png>